





BUPATI MELAWI  
KEPUTUSAN BUPATI MELAWI  
NOMOR 500.8 / 341 TAHUN 2023

TENTANG

PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN MELAWI TAHUN 2023

BUPATI MELAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 75 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi;
  - b. bahwa untuk menyediakan informasi ketahanan dan kerentanan pangan yang akurat dan komprehensif perlu disusun Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten, untuk dapat dimanfaatkan dan digunakan sebagai dasar perencanaan pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di Bidang Pangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
  2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Tugas Pembantuan kepada Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota di Lingkungan Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 425);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 167), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 221);

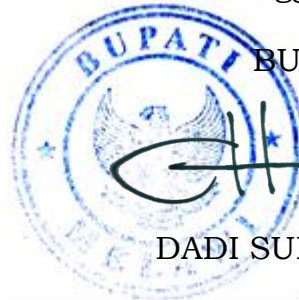


- Memperhatikan :
1. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1301);
  2. Peraturan Bupati Melawi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Melawi ( Berita Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
KESATU :
- KEDUA :
- KETIGA :
- : Menetapkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
  - : Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi dalam Menyusun rekomendasi kebijakan di bidang Pangan.
  - : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nanga Pinoh  
Pada tanggal 20 Desember 2023



BUPATI MELAWI,

DADI SUNARYA USFA YURSA



## SAMBUTAN BUPATI MELAWI

Marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga kita mendapat kenikmatan dan berada dalam keadaan sehat wal Afiat.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, ketahanan pangan akan mudah terwujud, apabila antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten serta masyarakat bersama-sama berkomitmen, konsisten dan bersinergi untuk mewujudkan ketahanan pangan.

Kemampuan untuk menghasilkan pangan dan terwujudnya ketahanan pangan, bukan kondisi yang bersifat statis, melainkan bersifat dinamis. Artinya, bahwa keberhasilan pencapaian produksi pangan, belum sepenuhnya menjamin tercapainya ketahanan pangan. Hal ini mengingat pangan tersebut, belum tentu sepenuhnya dapat diakses dan dijangkau oleh seluruh kelompok masyarakat.

Pada era globalisasi yang serba terbuka seperti sekarang ini, pengaruh perkembangan global sangat berpotensi menentukan status ketahanan pangan baik ditingkat internasional, nasional, regional bahkan sampai dengan ketahanan pangan tingkat perseorangan. Beberapa pengaruh global yang perlu mendapat perhatian yang merupakan tantangan dan hambatan dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan kedepan, diantaranya adalah:

- Pertama, adanya pengaruh perubahan iklim global, diantaranya mengakibatkan munculnya berbagai bencana alam seperti kekeringan, kebakaran sehingga mengancam terhadap keberhasilan peningkatan produksi bahan pangan.
- Kedua, adanya kelangkaan dan kompetisi pemanfaatan sumberdaya alam, diantaranya mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, sehingga lahan-lahan produktif untuk melakukan usaha tani/ komoditas pangan semakin berkurang.
- Ketiga, adanya pengaruh globalisasi perdagangan internasional, diantaranya akan berpengaruh terjadinya gejolak pasar dunia akan secara cepat mengakibatkan terjadinya gejolak harga di pasar nasional/domestik, yang tentunya dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat.

Beberapa bentuk implementasi program dalam rangka tantangan pembangunan ketahanan pangan, termasuk diantaranya antisipasi untuk penanganan terjadinya kerawanan pangan transien akibat terjadinya bencana maupun kronis akibat struktur masyarakat yang miskin dan kondisi infrastruktur desa yang buruk.



Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 114 dan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Pasal 75 mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi, yang dapat digunakan untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi, stabilisasi pasokan dan harga pangan serta sebagai sistem peringatan dini terhadap masalah pangan dan kerawanan pangan dan gizi.

Informasi tentang ketahanan dan kerentanan pangan penting untuk memberikan informasi kepada para pengambil keputusan dalam pembuatan program dan kebijakan, baik di tingkat pusat maupun tingkat lokal, untuk lebih memprioritaskan intervensi dan program berdasarkan kebutuhan dan potensi dampak kerawanan pangan yang tinggi. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai salah satu instrumen untuk mengelola krisis pangan dalam rangka upaya perlindungan/penghindaran dari krisis pangan dan gizi baik jangka pendek, menengah maupun panjang.

Dalam rangka menyediakan informasi ketahanan pangan yang akurat dan komprehensif, maka disusunlah buku Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan ( *food security and vulnerability atlas / FSVA* ) sebagai salah satu instrumen untuk monitoring ketahanan pangan wilayah.

Sebagai tindak lanjut penyusunan FSVA Nasional dan FSVA Provinsi dengan analisis sampai tingkat kecamatan maka disusun pula FSVA Kabupaten Melawi dengan analisis sampai tingkat desa. Dengan demikian, permasalahan pangan yang muncul dapat dideteksi secara cepat berdasarkan cakupan wilayahnya. Untuk mengakomodir perkembangan situasi ketahanan pangan dan pemekaran wilayah desa, maka dilakukan pemutakhiran FSVA Kabupaten Melawi pada Tahun 2023 ini.

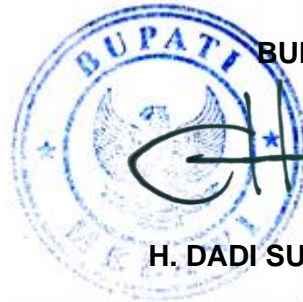

Dengan adanya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan ( *food security and vulnerability atlas / FSVA* ) Level Desa Kabupaten Melawi Tahun 2023 ini, diharapkan dapat berperan sebagai sarana informasi bagi para pengambil keputusan untuk secara cepat dalam mengidentifikasi daerah yang lebih rentan, sehingga program dari berbagai sektor seperti pelayanan jasa, pembangunan manusia dan infrastruktur yang berkaitan dengan ketahanan pangan, dapat memberi dampak yang lebih baik terhadap penghidupan serta ketahanan pangan dan gizi masyarakat di tingkat desa, Akan lebih mudah untuk membuat prioritas kebijakan, program dan kegiatan operasional untuk mengatasi masalah pangan di daerah, serta lebih memudahkan menentukan langkah awal dan menentukan solusi akhir dari gerakan mengatasi masalah ketahanan pangan yang terjadi di Kabupaten Melawi ini.

Akhirnya perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Badan Pangan Nasional, Badan Pusat Statistik Kabupaten Melawi dan semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan ( *food security and vulnerability atlas / FSVA* ) Level Desa Kabupaten Melawi Tahun 2023. Mari kita tingkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Melawi ini, agar tercipta sumber daya manusia yang cerdas dan berkualitas sehingga mampu



mengakselerasikan pelaksanaan pembangunan untuk kecukupan energi dan protein demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Melawi.

Nanga Pinoh, 20 Desember 2023

 **BUPATI MELAWI**  
  
**H. DADI SUNARYA USFA YURSA**





## KATA PENGANTAR

Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi tetap berkomitmen untuk mengatasi permasalahan pangan dan gizi yang terjadi di wilayah ini. Melalui penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan ( *food security and vulnerability atlas / FSVA* ) Level Desa Kabupaten Melawi 2023 diharapkan dapat menjadi suatu langkah awal untuk memantapkan strategi dan kebijakan serta prioritas kegiatan yang penting dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang sedang terjadi maupun yang mungkin akan terjadi, baik bersifat kronis maupun transien.

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan ( *food security and vulnerability atlas / FSVA* ) Level Desa Kabupaten Melawi 2023 dibuat dalam tatanan yang sangat baik antara Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Melawi, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat dan juga Badan Pangan Nasional, untuk dapat informasi yang riil dan lengkap dengan kondisi ketahanan dan kerentanan pangan pada seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Barat yang digambarkan dalam 3 dimensi yaitu; Ketersediaan Pangan, Akses Pangan dan Pemanfaatan Pangan yang digambarkan dalam 6 (enam) indikator yang sangat berpengaruh terhadap kondisi ketahanan dan kerentanan pangan suatu wilayah pada level desa.

Besar harapan kami dengan diluncurkannya peta ini dapat membawa suatu perubahan yang berarti dalam upaya peningkatan kewaspadaan dalam menghadapi masalah ketahanan pangan dan gizi di wilayah ini oleh seluruh pemangku kepentingan baik Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah Daerah yang terkoordinasi secara sistematis melalui Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Melawi

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat dan juga Badan Pangan Nasional atas komitmen dan dukungan yang intensif dalam upaya penyusunan sehingga peta ini dapat diluncurkan, juga kepada Tim Pengarah, Tim Teknis Penyusunan FSVA dan semua pihak terkait yang telah membantu mulai dari penyusunan hingga penerbitannya.

Pada akhirnya kami berharap peta ini dapat bermanfaat demi tercapainya kondisi Ketahanan Pangan dan Gizi masyarakat di Kabupaten Melawi semakin baik, dan saran untuk penyempurnaan sangat kami harapkan.

Nanga Pinoh, 15 Desember 2023

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
KABUPATEN MELAWI**



M. SYAIFUL KHAIR, S.Sos, M.Si





## RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Ketersediaan informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif, dan tertata dengan baik sangat penting untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kerawanan pangan dan gizi, karena dapat memberikan arah dan rekomendasi kepada pembuat keputusan dalam penyusunan program, kebijakan, serta pelaksanaan intervensi di tingkat pusat dan daerah. Penyediaan informasi diamanahkan dalam UU No 18/ 2012 tentang Pangan dan PP No 17/2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi.
2. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA*) merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisa data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan. Informasi dalam FSVA menjelaskan lokasi wilayah rentan terhadap kerawanan pangan dan indikator utama daerah tersebut rentan terhadap kerawanan pangan.
3. FSVA Kabupaten merupakan peta yang menggambarkan situasi ketahanan dan kerentanan pangan wilayah desa. Indikator yang digunakan dalam penyusunan FSVA merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator didasarkan pada: (i) keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan (ii) tingkat sensitifitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; dan (iii) ketersediaan data tersedia secara rutin untuk periode tertentu yang mencakup seluruh wilayah desa. Enam indikator digunakan dalam penyusunan FSVA Kabupaten.
4. Indikator pada aspek ketersediaan pangan adalah (1) Rasio luas lahan baku sawah terhadap luas lahan total; (2) Rasio jumlah sarana dan prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga. Indikator pada akses pangan adalah (1) Rasio penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap total jumlah penduduk; (2) Desa dengan akses penghubung kurang memadai. Indikator pada aspek pemanfaatan pangan adalah: (1) Rasio rumah tangga tanpa akses air bersih; (2) Rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk.
5. Desa/kelurahan diklasifikasikan dalam 6 kelompok ketahanan pangan dan gizi berdasarkan pada tingkat keparahan dan penyebab dari situasi ketahanan pangan dan gizi. Desa/kelurahan di Prioritas 1, 2 dan 3 merupakan wilayah rentan pangan dengan klasifikasi Prioritas 1 tingkat rentan pangan tinggi, Prioritas 2 rentan pangan sedang, dan prioritas 3 rentan pangan rendah. Desa/kelurahan di Prioritas 4, 5, dan 6 merupakan wilayah tahan pangan dengan klasifikasi prioritas 4 tahan pangan rendah, prioritas 5 tahan pangan sedang, sedangkan prioritas 6 yaitu tahan pangan tinggi.
6. Hasil analisis FSVA 2023 menunjukkan bahwa desa rentan pangan Prioritas 1-3 sebanyak 28 desa dari 169 desa (16,56%) yang terdiri dari 0 desa ( 0 %) Prioritas 1; 4 desa (2,37 %) Prioritas 2; dan 24 desa ( 14.20 %) Prioritas 3.  
  
Desa prioritas 2 tersebar 1 desa di kecamatan Sokan dan 3 Desa di kecamatan Tanah Pinoh Barat.  
  
Desa prioritas 3 tersebar 4 desa di kecamatan Sokan, 6 Desa di kecamatan Tanah Pinoh Barat, 1 Desa di Kecamatan Belimbing, 1 Desa di Kecamatan Pinoh Selatan, 4 Desa di Kecamatan Pinoh Utara, 5 Desa di Kecamatan Ella Hilir dan 3 Desa di Kecamatan Menukung.



Karakteristik Desa Rentan Pangan ditandai dengan tingginya jumlah desa yang tidak memiliki sarana dan prasarana pangan, tingginya jumlah rasio penduduk per tenaga Kesehatan per Density dan Rumah Tangga Tanpa Akses Air Bersih Terhadap Jumlah Rumah Tangga.

7. Program-program peningkatan ketahanan pangan dan menangani kerentanan pangan desa diarahkan pada kegiatan:
  - a. Peningkatan penyediaan pangan di daerah non sentra produksi dengan mengoptimalkan sumberdaya pangan lokal.
  - b. Pembukaan lahan pertanian pertanian baru.
  - c. Penanganan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja, padat karya, redistribusi lahan; pembangunan infrastruktur dasar (jalan, air bersih), dan pemberian bantuan sosial; serta pembangunan usaha produktif/UMKM/padat karya untuk menggerakkan ekonomi wilayah.
  - d. Peningkatan akses air bersih melalui penyediaan fasilitas dan layanan air bersih; sosialisasi dan penyuluhan.
  - e. Penyediaan tenaga kesehatan.



## DAFTAR ISI

<b>SAMBUTAN BUPATI</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b>	
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	iv
<b>DAFTAR PETA DAN GAMBAR</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi .....	2
1.3. Metodologi .....	4
<b>BAB II KETERSEDIAAN PANGAN</b> .....	8
2.1. Lahan Pertanian.....	8
2.2. Produksi Pangan.....	9
2.3. Sarana dan Prasarana Ekonomi .....	10
2.4. Strategi Pemenuhan Ketersediaan Pangan .....	10
2.5. Strategi Untuk Meningkatkan Ketersediaan Pangan .....	11
<b>BAB III AKSES TERHADAP PANGAN</b> .....	12
3.1. Penduduk Dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah.....	12
3.2. Akses Transportasi .....	13
3.4. Strategi Peningkatan Akses Pangan.....	13
<b>BAB IV PEMANFAATAN PANGAN</b> .....	15
4.1. Akses Terhadap Air Bersih .....	15
4.2. Rasio Tenaga Kesehatan.....	15
4.3. Dampak (Outcome) Dari Status Kesehatan .....	16
4.4. Strategi Peningkatan Pemanfaatan Pangan .....	17
<b>BAB V KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOMPOSIT</b> .....	20
5.1. Kondisi Ketahanan Pangan.....	20
5.2. Faktor Penyebab Kerentanan Pangan .....	21
<b>BAB VI REKOMENDASI KEBIJAKAN</b> .....	22
<b>LAMPIRAN</b> .....	24
<b>DAFTAR TABEL</b>	
Tabel 1.1. Indikator FSVA Kabupaten 2023.....	5
Tabel 1.2. Bobot Indikator Individu .....	6
Tabel 2.1. Sebaran Rasio Luas Baku Lahan Sawah terhadap total lahan berdasarkan prioritas.....	8
Tabel 2.2. Produksi Serelia Pokok dan Umbi-Umbian 2018-2022 .....	9
Tabel 2.3. Sebaran Rasio Sarana dan Prasarana Ekonomi Berdasarkan Prioritas .....	10



Tabel 3.1. Persentase Populasi di Bawah Garis Kemiskinan Kabupaten Melawi .....	12
Tabel 3.2. Sebaran Desa Dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah Berdasarkan Skala Prioritas .....	12
Tabel 4.1. Sebaran Desa Berdasarkan Rumah Tangga Tanpa Air Bersih Berdasarkan Skala Prioritas.....	15
Tabel 4.2. Sebaran Rasio Tenaga Kesehatan Di Desa Berdasarkan Skala Prioritas.....	16
Tabel 4.3. Penderita Gizi Buruk 2018-2022 .....	16
Tabel 4.4. Jumlah Kematian Balita dan Ibu Saat Melahirkan Per Kecamatan 2022 .....	17
Tabel 5.1. Sebaran Jumlah Desa Berdasarkan Prioritas .....	20
Tabel Lampiran Data Indeks Ketersediaan, Keterjangkauan, dan Pemanfaatan Wilayah Desa 2023 .....	26
Tabel Lampiran Hasil Analisis Peta Ketahanan Pangan Level Desa Tahun 2023 .....	29

### DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1. Rasio Lahan .....	9
Grafik 2.2. Rasio Sarana .....	10

### DAFTAR PETA DAN GAMBAR

#### DAFTAR PETA

Peta FSVA Kabupaten Melawi Tahun 2022 Rasio Komposit.....	33
Peta FSVA Kabupaten Melawi Tahun 2022 Rasio Lahan.....	34
Peta FSVA Kabupaten Melawi Tahun 2022 Rasio Sarana dan Prasarana.....	35
Peta FSVA Kabupaten Melawi Tahun 2022 Rasio Penduduk Tidak Sejahtera.....	36
Peta FSVA Kabupaten Melawi Tahun 2022 Rasio Akses Jalan .....	37
Peta FSVA Kabupaten Melawi Tahun 2022 Rasio Rumah Tangga Tanpa Akses Air Bersih .....	38
Peta FSVA Kabupaten Melawi Tahun 2022 Rasio Penduduk Per Tenkes Density.....	39
Peta FSVA Kecamatan Belimbing .....	40
Peta FSVA Kecamatan Belimbing Hulu.....	41
Peta FSVA Kecamatan Ella Hilir.....	42
Peta FSVA Kecamatan Menukung .....	43
Peta FSVA Kecamatan Nanga Pinoh .....	44
Peta FSVA Kecamatan Pinoh Selatan.....	45
Peta FSVA Kecamatan Tanah Pinoh.....	46
Peta FSVA Kecamatan Sayan.....	47
Peta FSVA Kecamatan Sokan.....	48
Peta FSVA Kecamatan Tanah Pinoh Barat .....	49
Peta FSVA Kecamatan Pinoh Utara .....	50

#### DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi .....	4
Gambar 6.1. Kerangka Intervensi untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan.....	22



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Kabupaten Melawi terdiri dari 11 kecamatan dan 169 desa dengan total penduduk sebesar 231.242 jiwa yang secara geografis terletak di 0° 07'- 1°20' LS dan 111° 7'- 112° 27' BT dan secara administratif berbatasan dengan :

- Sebelah Utara dan Timur berbatasan dengan Kabupaten Sintang.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Ketapang.

Kabupaten Melawi yang memiliki wilayah daratan seluas 10.640,80 km<sup>2</sup> dimana 8.818,70 km<sup>2</sup> adalah wilayah perbukitan atau 82,85 % dari luas wilayah keseluruhan. Kecamatan Sokan merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Melawi dengan luas 1.577,2 km<sup>2</sup> (mencakup sekitar 14,82 % dari luas Kabupaten Melawi). Sementara Kecamatan Belimbing Hulu merupakan Kecamatan terkecil dengan luas sebesar 454 km<sup>2</sup> (mencakup 4,27 % luas Kabupaten Melawi). (Sumber :*Kabupaten Melawi Dalam Angka 2023, BPS*)

Secara klimatologis, Kabupaten Melawi merupakan daerah yang beriklim tropis karena terletak di sekitar garis khatulistiwa. Pada tahun 2022 Kabupaten Melawi mendapat rata-rata curah hujan 396,58 mm (sedikit lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya). Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Juni sebesar 526,3 mm. Rata-rata penyinaran matahari di Kabupaten Melawi pada tahun 2022 sebesar 4,7 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Melawi mendapat lebih sedikit penyinaran matahari sepanjang tahun 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Suhu tertinggi terjadi pada bulan Maret mencapai 35,6°C dan terendah pada bulan Januari dan Desember di suhu 34,°C dengan rata-rata suhu sepanjang tahun sebesar 34,7°C. (Sumber : *Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Kabupaten Melawi, Kabupaten Melawi Dalam Angka 2023, BPS*).

Perekonomian Kabupaten Melawi tergantung pada sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang masih mempunyai peranan tinggi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku, yaitu sebesar 19,96 % . persentase tersebut menurun dari tahun 2021 yang sebesar 20,24 . Kontributor terbesar lainnya adalah sektor Perdagangan dan Kontruksi yang masing-masing menyumbang 15,54 % dan 14,40 % . Kondisi ini menunjukkan bahwa masih sangat banyak hal yang harus dilakukan oleh pemerintah dan para pemegang kepentingan (stakeholder) dalam melakukan pembangunan. (Sumber :*Kabupaten Melawi Dalam Angka 2023, BPS*).

Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 114 dan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Pasal 75 mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi, yang dapat digunakan untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi, stabilisasi pasokan dan harga pangan serta sebagai sistem peringatan dini terhadap masalah pangan dan kerawanan pangan dan gizi.



Informasi tentang ketahanan dan kerentanan pangan penting untuk memberikan informasi kepada para pembuat keputusan dalam pembuatan program dan kebijakan, baik di tingkat pusat maupun tingkat lokal, untuk lebih memprioritaskan intervensi dan program berdasarkan kebutuhan dan potensi dampak kerawanan pangan yang tinggi. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai salah satu instrumen untuk mengelola krisis pangan dalam rangka upaya perlindungan/penghindaran dari krisis pangan dan gizi baik jangka pendek, menengah maupun panjang.

Dalam rangka menyediakan informasi ketahanan pangan yang akurat dan komprehensif, disusunlah Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/*Food Security and Vulnerability Atlas-FSVA* sebagai instrumen untuk monitoring ketahanan pangan wilayah. Di tingkat nasional FSVA disusun sejak tahun 2002 bekerja sama dengan *World Food Programme (WFP)*. Kerjasama tersebut telah menghasilkan Peta Kerawanan Pangan (*Food Insecurity Atlas - FIA*) pada tahun 2005. Pada tahun 2009, 2015, 2018 disusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA*).

Sebagai tindak lanjut penyusunan FSVA Nasional disusun pula FSVA Provinsi dengan analisis sampai tingkat kecamatan dan FSVA Kabupaten dengan analisis sampai tingkat desa. Dengan demikian, permasalahan pangan dapat dideteksi secara cepat sampai level yang paling bawah. FSVA kabupaten telah disusun sejak tahun 2012 dan dimutakhirkan pada tahun 2016. Untuk mengakomodir perkembangan situasi ketahanan pangan dan pemekaran wilayah desa, maka dilakukan pemutakhiran FSVA Kabupaten pada tahun 2022.

Seperti halnya FSVA Nasional dan Provinsi, FSVA Kabupaten menyediakan sarana bagi para pengambil keputusan untuk secara cepat dalam mengidentifikasi daerah yang lebih rentan, dimana investasi dari berbagai sektor seperti pelayanan jasa, pembangunan manusia dan infrastruktur yang berkaitan dengan ketahanan pangan dapat memberikan dampak yang lebih baik terhadap penghidupan, ketahanan pangan dan gizi masyarakat pada tingkat desa.

Pengembangan FSVA tingkat desa merupakan hal yang sangat penting, dimana kondisi ekologi dan kepulauan yang membentang dari timur ke barat, kondisi iklim yang dinamis dan keragaman sumber penghidupan masyarakat menunjukkan adanya perbedaan situasi ketahanan pangan dan gizi di masing-masing wilayah. FSVA Kabupaten akan menjadi alat yang sangat penting dalam perencanaan dan pengambilan keputusan untuk mengurangi kesenjangan ketahanan pangan.

## 1.2. KERANGKA KONSEP KETAHANAN PANGAN DAN GIZI

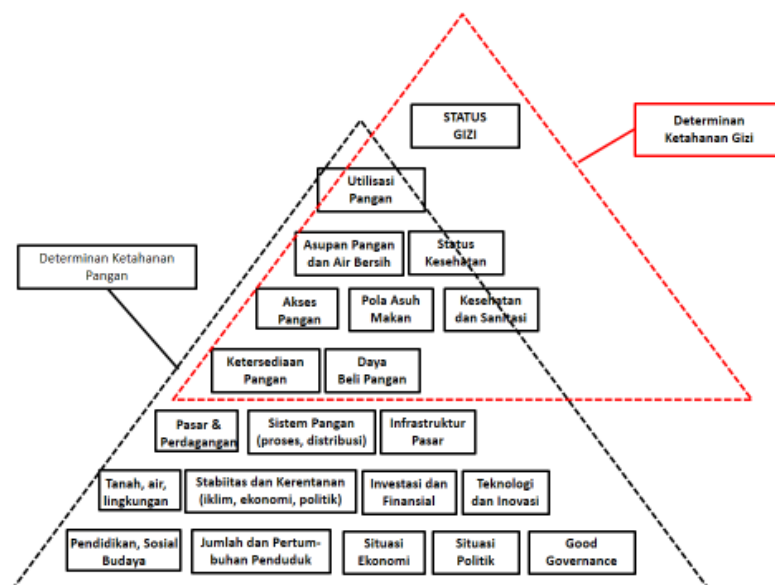
Peran pangan bukan hanya penting untuk memenuhi kebutuhan fisik dasar dan mencegah kelaparan, namun lebih jauh dari itu peran pangan dengan kandungan gizi di dalamnya bagi kecerdasan bangsa dan peningkatan kualitas hidup manusia untuk menghasilkan manusia yang sehat, cerdas, aktif dan produktif seperti disebutkan dalam definisi ketahanan pangan. Kecukupan pemenuhan pangan dalam jumlah dan mutunya berkorelasi dengan produktivitas kerja dan pertumbuhan otak serta kecerdasan dan pada akhirnya berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam undang-undang didefinisikan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Menimbang pentingnya ketahanan pangan dalam pembangunan nasional, Bab III Undang-undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 mengamanatkan bahwa Pemerintah harus melakukan perencanaan penyelenggaraan pangan. Pada pasal 6, penyelenggaraan pangan diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan.



Definisi ketahanan pangan (*food security*) yang dianut oleh *Food and Agricultural Organisation* (FAO) dan dirujuk oleh UU Pangan saat ini mengacu pada konsep awal *food security* yang dihasilkan oleh *World Food Summit* tahun 1996. Merujuk pada konsep tentang pentingnya *nutrition security* yang diajukan oleh Unicef pada awal tahun 1990an yang menambahkan aspek penyakit infeksi sebagai penyebab masalah gizi disamping ketahanan pangan rumah tangga, maka *International Food Policy Research Institute* (IFPRI) menyebut konsep ketahanan pangan FAO tersebut sebagai *Food and Nutrition Security*. Pada tahun 2012 FAO<sup>1</sup> mengajukan definisi *food security* menjadi *food and nutrition security* untuk menyempurnakan konsep dan definisi sebelumnya.

Upaya FAO ini sejalan dengan upaya *Standing Committee on Nutrition* (SCN), suatu lembaga non struktural yang juga berada di bawah United Nations (PBB) yang pada tahun 2013<sup>2</sup> juga merekomendasikan penyempurnaan definisi ketahanan pangan (*food security*) menjadi ketahanan pangan dan gizi (*food and nutrition security*). Dalam pemahaman baru ini, perwujudan ketahanan pangan tidak hanya berorientasi pada upaya penyediaan pangan dalam jumlah yang cukup bagi setiap individu, namun juga harus disertai upaya untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan pangan bagi terciptanya status gizi yang baik bagi setiap individu. Dalam konteks ini optimalisasi utilisasi pangan tidak cukup hanya dari kualitas pangan yang dikonsumsi, namun juga harus didukung oleh terhindarnya setiap individu dari penyakit infeksi yang dapat mengganggu tumbuh kembang dan kesehatan melalui kecukupan air bersih dan kondisi sanitasi lingkungan dan higiene yang baik. Kerangka pikir ketahanan pangan dan gizi ini dituangkan dalam Gambar 1.1.



Gambar 1.1. Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi (Sumber: FAO dan UNSCN)

Analisis dan pemetaan FSVA dilakukan berdasarkan pada pemahaman mengenai **ketahanan pangan dan gizi** seperti yang tercantum dalam Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi (Gambar 1.1). Kerangka konseptual tersebut dibangun berdasarkan tiga pilar ketahanan pangan, yaitu: ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan, serta mengintegrasikan gizi dan kerentanan di dalam keseluruhan pilar tersebut.

**Ketersediaan pangan** adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan, serta pemasukan pangan (termasuk didalamnya impor dan bantuan pangan)

<sup>1</sup> Disampaikan pada Committee on World Food Security, 36th sessions of 15-22 October 2012, Rome-Italia

<sup>2</sup> Disampaikan pada UNSCN Meeting of the Minds and Nutrition Impact of Food System, 25-28 March di New York



apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Ketersediaan pangan dapat dihitung pada tingkat nasional, regional, kecamatan dan tingkat masyarakat.

**Akses pangan** adalah **kemampuan rumah tangga untuk memperoleh** cukup pangan yang bergizi, melalui satu atau kombinasi dari berbagai sumber seperti: produksi dan persediaan sendiri, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Pangan mungkin tersedia di suatu daerah tetapi tidak dapat diakses oleh rumah tangga tertentu jika mereka tidak mampu secara fisik, ekonomi atau sosial, mengakses jumlah dan keragaman makanan yang cukup.

**Pemanfaatan pangan** merujuk pada **penggunaan pangan oleh rumah tangga dan kemampuan individu** untuk menyerap dan memetabolisme zat gizi. Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan dan penyiapan makanan, keamanan air untuk minum dan memasak, kondisi kebersihan, kebiasaan pemberian makan (terutama bagi individu dengan kebutuhan makanan khusus), distribusi makanan dalam rumah tangga sesuai dengan kebutuhan individu (pertumbuhan, kehamilan dan menyusui), dan status kesehatan setiap anggota rumah tangga. Mengingat peran yang besar dari seorang ibu dalam meningkatkan profil gizi keluarga, terutama untuk bayi dan anak-anak, pendidikan ibu sering digunakan sebagai salah satu *proxy* untuk mengukur pemanfaatan pangan rumah tangga.

**Dampak gizi dan kesehatan** merujuk pada status gizi individu, termasuk defisiensi mikronutrien, pencapaian morbiditas dan mortalitas. Faktor-faktor yang berhubungan dengan pangan, serta praktek-praktek perawatan umum, memiliki kontribusi terhadap dampak keadaan gizi pada kesehatan masyarakat dan penanganan penyakit yang lebih luas.

Kerentanan dalam peta ini selanjutnya merujuk pada kerentanan terhadap **kerawanan pangan dan gizi**. Tingkat kerentanan individu, rumah tangga atau kelompok masyarakat ditentukan oleh pemahaman terhadap faktor-faktor risiko dan kemampuan untuk mengatasi situasi tertekan.

Kerawanan pangan dapat menjadi kondisi yang kronis atau transien. **Kerawanan pangan kronis** adalah ketidakmampuan jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum dan biasanya berhubungan dengan struktural dan faktor-faktor yang tidak berubah dengan cepat, seperti iklim setempat, jenis tanah, sistem pemerintahan daerah, infrastruktur publik, sistem kepemilikan lahan, distribusi pendapatan dan mata pencaharian, hubungan antar suku, tingkat pendidikan, sosial budaya/adat istiadat dll.

**Kerawanan pangan transien** adalah ketidakmampuan sementara yang bersifat jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum yang sebagian besar berhubungan dengan faktor dinamis yang dapat berubah dengan cepat/tiba-tiba seperti penyakit menular, bencana alam, pengungsian, perubahan fungsi pasar, tingkat hutang dan migrasi. Perubahan faktor dinamis tersebut umumnya menyebabkan kenaikan harga pangan yang lebih mempengaruhi penduduk miskin dibandingkan penduduk kaya, mengingat sebagian besar dari pendapatan penduduk miskin digunakan untuk membeli makanan. Kerawanan pangan transien yang berulang dapat menyebabkan kerawanan aset rumah tangga, menurunnya ketahanan pangan dan akhirnya dapat menyebabkan kerawanan pangan kronis.

### 1.3. METODOLOGI

Kerentanan pangan dan gizi adalah masalah multi-dimensional yang memerlukan analisis dari sejumlah parameter. Kompleksitas masalah ketahanan pangan dan gizi dapat dikurangi dengan mengelompokkan indikator *proxy* ke dalam tiga kelompok yang berbeda tetapi saling berhubungan,





yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan/akses rumah tangga terhadap pangan dan pemanfaatan pangan secara individu. Pertimbangan gizi, termasuk ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan bergizi tersebar dalam ketiga kelompok tersebut.

## Indikator

Kerentanan terhadap kerawanan pangan tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten, memiliki karakteristik masing-masing sehingga tidak semua indikator nasional maupun provinsi dapat digunakan untuk memetakan kerentanan terhadap kerawanan pangan di tingkat kabupaten. Pemilihan indikator FSVA Kabupaten didasarkan pada: (i) hasil review terhadap pemetaan daerah rentan rawan pangan yang telah dilakukan sebelumnya; (ii) tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; (iii) keterwakilan pilar ketahanan pangan dan gizi; dan (iv) ketersediaan data pada seluruh desa.

Indikator yang digunakan dalam FSVA Kabupaten terdiri dari 6 (enam) indikator yang mencerminkan tiga aspek ketahanan pangan.

**Tabel 1.1. Indikator FSVA Kabupaten 2023**

Indikator	Definisi	Sumber Data
<b>A. Aspek Ketersediaan Pangan</b>		
Rasio luas baku lahan sawah terhadap luas wilayah desa	Luas baku lahan sawah dibandingkan luas wilayah desa	BPS; Pusat Data Informasi Kementan 2019
Rasio jumlah sarana dan prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga	Jumlah sarana dan prasarana ekonomi (pasar, minimarket, toko, warung, restoran dll) dibandingkan jumlah rumah tangga desa	Potensi Desa 2020, BPS Jumlah Rumah Tangga 2018 dari Proyeksi Sensus Penduduk (SP) 2010
<b>B. Aspek Akses terhadap Pangan</b>		
Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa	Jumlah penduduk dengan status kesejahteraan terendah (penduduk dengan tingkat kesejahteraan pada Desil 1) dibandingkan jumlah penduduk desa	Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (SK.71/2018) Jumlah Rumah Tangga 2018 dari Proyeksi SP 2010
Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat atau air atau udara	Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai dengan kriteria: (1) Desa dengan sarana transportasi darat tidak dapat dilalui sepanjang tahun; (2) Desa dengan sarana transportasi air atau udara namun tidak tersedia angkutan umum	Potensi Desa 2018, BPS
<b>C. Aspek Pemanfaatan Pangan</b>		
Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga desa	Jumlah rumah tangga desil 1 s/d 4 dengan sumber air bersih tidak terlindung dibandingkan jumlah rumah tangga desa	Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (SK.71/2018)



Rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk desa	Jumlah tenaga kesehatan terdiri atas: 1) Dokter umum/spesialis; 2) dokter gigi; 3) bidan; 4) tenaga kesehatan lainnya (perawat, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, apoteker/asisten apoteker) dibandingkan jumlah penduduk desa	Potensi Desa 2018, BPS Jumlah penduduk 2018 dari Proyeksi SP 2010
---	--	--

## 1.4. Metode Analisis

### 1. Analisis Indikator Individu

Analisis indikator individu dilakukan dengan mengelompokkan indikator individu kedalam beberapa kelas berdasarkan metode sebaran empiris. Sementara itu data kategorik mengikuti standar pengelompokan yang sudah ditetapkan oleh BPS.

### 2. Analisis Komposit

Metodologi yang diadopsi untuk analisis komposit adalah dengan menggunakan metode pembobotan. Metode pembobotan digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan relatif indikator terhadap masing-masing aspek ketahanan pangan. Metode pembobotan dalam penyusunan FSVA mengacu pada metode yang dikembangkan oleh *The Economist Intelligence Unit* (EIU) dalam penyusunan *Global Food Security Index* (EIU 2016 dan 2017) dan *International Food Policy Research Institute* (IFPRI) dalam penyusunan *Global Hunger Index* (IFPRI 2017). Goodridge (2007) menyatakan jika variabel yang digunakan dalam perhitungan indeks berbeda, maka perlu dilakukan secara tertimbang (pembobotan) untuk membentuk indeks agregat yang disesuaikan dengan tujuannya.

Langkah-langkah perhitungan analisis komposit adalah sebagai berikut:

- Standarisasi nilai indikator dengan menggunakan *z-score* dan *distance to scale* (0 – 100)
- Menghitung skor komposit kabupaten/kota dengan cara menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang sudah distandarisasi dengan bobot indikator, dengan rumus:

$$Y(j) = \sum_{n=1}^9 a_i X_{ij} \dots\dots\dots (1)$$

Dimana:

$Y_j$  : Skor komposit kabupaten/kota ke-j

$a_i$  : Bobot masing-masing indikator

$X_{ij}$  : Nilai standarisasi masing-masing indikator pada kabupaten/kota ke-j

Besaran bobot masing-masing indikator dibagi sama besar untuk setiap aspek ketahanan pangan, karena setiap aspek memiliki peran yang sama besar terhadap penentuan ketahanan pangan wilayah. Bobot untuk setiap indikator mencerminkan signifikansi atau pentingnya indikator tersebut dalam menentukan tingkat ketahanan pangan suatu wilayah.

Tabel 1.2 Bobot Indikator Individu

No	Indikator	Bobot
1.	Rasio luas baku lahan sawah terhadap luas wilayah desa	1/6
2.	Rasio jumlah sarana dan prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga	1/6



<b>Sub Total</b>	<b>1/3</b>
3. Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa	1/6
4. Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai	1/6
<b>Sub Total</b>	<b>1/3</b>
5 Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga desa	1/6
8 Rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk desa	1/6
<b>Sub Total</b>	<b>1/3</b>

c. Mengelompokkan desa/kelurahan ke dalam 6 kelompok prioritas berdasarkan *cut off point* komposit. Skor komposit yang dihasilkan pada masing-masing wilayah dikelompokkan ke dalam 6 kelompok berdasarkan *cut off point* komposit. *Cut off point* komposit merupakan hasil penjumlahan dari masing-masing perkalian antara bobot indikator individu dengan *cut off point* indikator individu hasil standarisasi *z-score* dan *distance to scale* (0-100).

$$K(j) = \sum_{n=1}^9 a_i C_{ij} \dots\dots\dots (2)$$

Dimana:

$K_j$  : *cut off point* komposit ke-J

$a_i$  : Bobot indikator ke-i

$C_{ij}$  : Nilai standarisasi *cut off point* indikator ke-I kelompok ke-j

Wilayah yang masuk ke dalam kelompok 1 adalah desa/kelurahan yang cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi daripada desa/kelurahan dengan kelompok di atasnya, sebaliknya wilayah pada kelompok 6 merupakan desa/kelurahan yang memiliki ketahanan pangan paling baik. Penting untuk menegaskan kembali bahwa sebuah desa/kelurahan yang diidentifikasi sebagai relatif lebih tahan pangan (kelompok Prioritas 4-6), tidak berarti semua penduduk di dalamnya juga tahan pangan. Demikian juga, tidak semua penduduk di desa/kelurahan Prioritas 1-3 tergolong rentan pangan.

### 3. Pemetaan

Hasil analisis indikator individu dan komposit kemudian divisualisasikan dalam bentuk peta. Peta-peta yang dihasilkan menggunakan pola warna seragam dalam gradasi warna merah dan hijau. Gradasi merah menunjukkan variasi tingkat kerentanan pangan tinggi dan gradasi hijau menggambarkan variasi kerentanan pangan rendah. Untuk kedua kelompok warna tersebut, warna yang semakin tua menunjukkan tingkat yang lebih tinggi dari ketahanan atau kerentanan pangan.



## BAB II

### KETERSEDIAAN PANGAN

Undang-undang Pangan No. 18 tahun 2012 mendefinisikan ketersediaan pangan sebagai kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan. Sedangkan cadangan pangan nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat. Penyediaan pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan secara berkelanjutan.

Mayoritas bahan pangan yang diproduksi maupun didatangkan dari luar wilayah harus masuk terlebih dahulu ke pasar sebelum sampai ke rumah tangga. Oleh karena itu, selain kapasitas produksi pangan, keberadaan sarana dan prasarana penyedia pangan seperti pasar akan terkait erat dengan ketersediaan pangan di suatu wilayah.

#### 2.1. LAHAN PERTANIAN

Rasio luas baku lahan sawah terhadap luas wilayah kabupaten adalah perbandingan antara luas baku lahan sawah dengan luas wilayah desa. Rasio lahan sawah terhadap luas wilayah desa digunakan sebagai salah satu indikator dalam aspek ketersediaan pangan karena lahan sawah memiliki korelasi yang positif terhadap tingkat ketersediaan pangan dengan mempengaruhi kapasitas produksi pangan<sup>3</sup>. Oleh sebab itu, semakin tinggi rasio luas lahan sawah terhadap luas wilayah desa maka diasumsikan ketersediaan pangan juga akan semakin baik, begitu pula sebaliknya.

Dari 169 desa di Kabupaten Melawi, 24 desa masuk dalam prioritas 1 (14,20 %) , 3 desa prioritas 2 (1,77 %) dan 11 desa prioritas 3 (6,50 %). Kecamatan yang memiliki rasio lahan prioritas 1-3 sebagian besar tersebar di Kecamatan Ella Hilir yaitu sebanyak 8 desa, Kecamatan Menukung sebanyak 7 Desa dan Kecamatan Nanga Pinoh sebanyak 6 Desa.

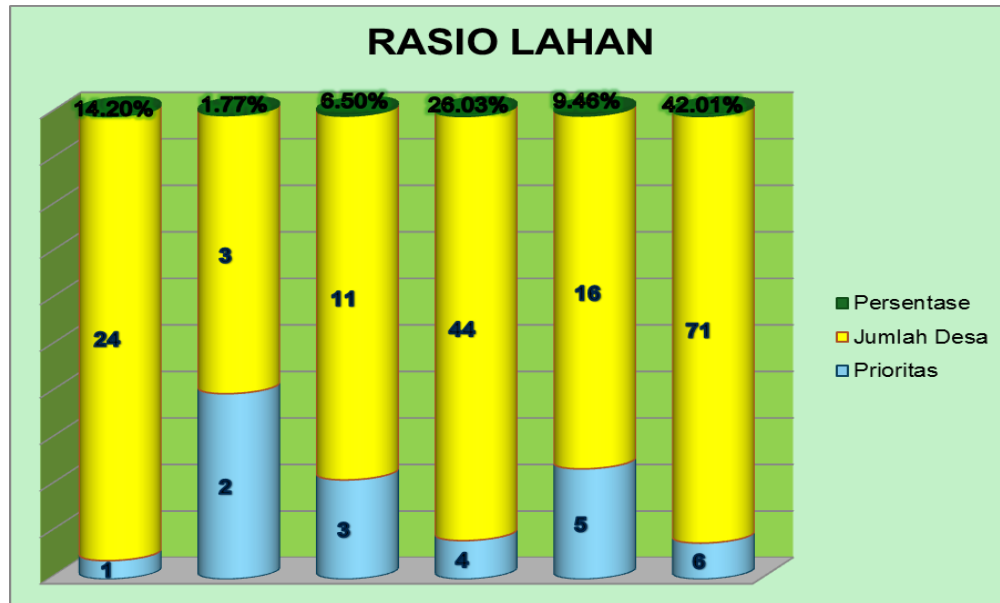
Tabel 2.1 Sebaran Rasio Luas Baku Lahan Sawah Terhadap Total Lahan Berdasarkan Prioritas

Prioritas	Rasio lahan sawah	Jumlah Desa	Persentase
1	Sangat Rentan	24	14,20 %
2	Rentan	3	1,77 %
3	Agak Rentan	11	6,50 %
4	Agak Tahan	44	26,03 %
5	Tahan	16	9,46 %
6	Sangat Tahan	71	42,01 %

<sup>3</sup> Yudhistira (2013) Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Ketahanan Pangan di Kabupaten Bekasi Jawa Barat. Fakultas Ekonomi dan



Grafik 2.1 Rasio Lahan



## 2.2. PRODUKSI PANGAN

Pemerintah Kabupaten Melawi telah mempromosikan produksi pertanian dan telah mengadopsi beberapa tindakan perlindungan bagi petani. Pertanian (termasuk peternakan, kehutanan, dan perikanan) telah memberikan kontribusi sebesar 19,96 % dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Melawi pada tahun 2022 dan memberikan peluang yang signifikan untuk berkontribusi dalam meningkatkan ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan, dan dinamika pertumbuhan ekonomi. Padi merupakan bahan pokok di Kabupaten Melawi yang menyumbang terbesar dari total produksi serealida kabupaten. Berdasarkan Tabel 2.2, produksi umbi-umbian di Kabupaten Melawi mengalami peningkatan pada tahun 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh bertambahnya luas tanam dan peningkatan produktivitas. Produksi padi meningkat dalam 5 tahun, yaitu dari pencapaian produksi 5,767 ton tahun 2018 menjadi 7,925 pada tahun 2022.

Tabel 2.2 Produksi Serealida Pokok dan Umbi-umbian 2018-2022 (Ton)

Serealida	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata 5 tahun
<b>Padi</b>	5,767	11,692	9,825	9,487	7,925	8,939
<b>Jagung</b>	1,457	919	672	677	994	941
<b>Ubi Kayu</b>	5,666	5,900	8,247	8,060	4,129	6,400
<b>Ubi Jalar</b>	168	168	464	443	803	409

Sumber: Kabupaten Dalam Angka 2018-2022, BPS, [data.kalbarprov.go.id/organization/dinas-pertanian-tanaman-pangan-dan hortikultura-prov-kalbar](http://data.kalbarprov.go.id/organization/dinas-pertanian-tanaman-pangan-dan-hortikultura-prov-kalbar)

Tahun 2022, total produksi serealida dan umbi-umbian mencapai 13,851 ton, antara lain padi 7,925 ton, jagung 994 ton, ubi kayu 4,129 ton dan ubi jalar 803 ton.

Total produksi serealida dan laju pertumbuhan produksi tahun 2018-2022 menunjukkan pertumbuhan, yaitu dari total produksi tahun 2018 sebesar 13,058 ton menjadi 13,851 ton pada tahun 2022. Sebaran total produksi serealida selama 5 tahun terbesar terjadi pada tahun 2019, yaitu sebesar 11,692 ton dan terkecil pada tahun 2018 sebesar 5,767 Ton.



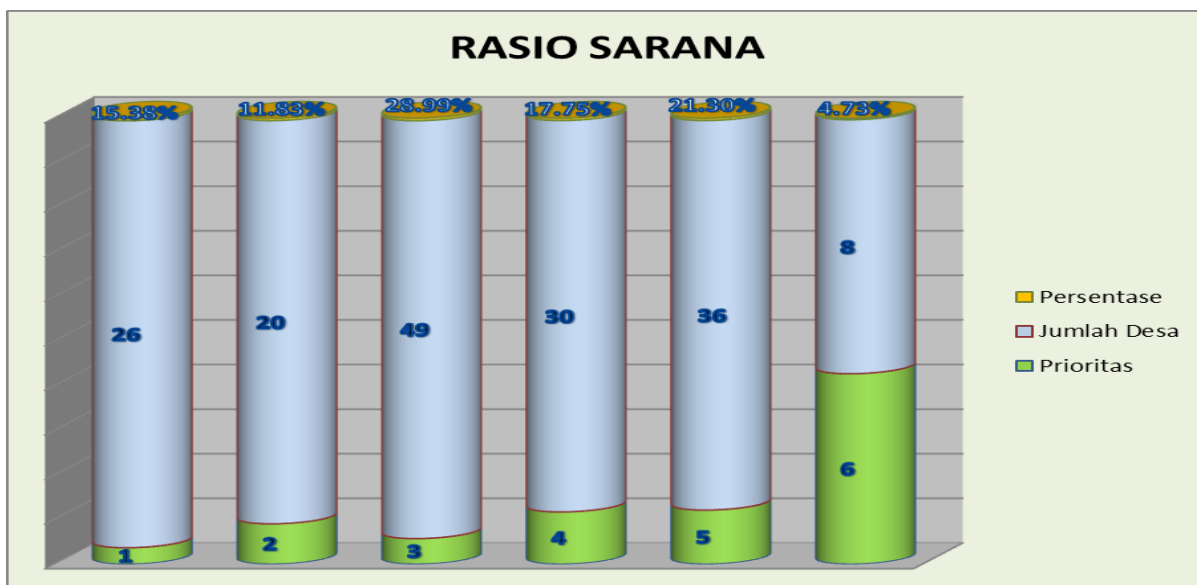
### 2.3. SARANA DAN PRASARANA EKONOMI

Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga adalah perbandingan antara jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan (pasar, minimarket, toko, warung, restoran, dll) dengan jumlah rumah tangga di desa. Sarana dan prasarana penyedia pangan diasumsikan sebagai tempat penyimpanan pangan (stok pangan) yang diperoleh dari petani sebagai produsen pangan maupun dari luar wilayah, yang selanjutnya disediakan bagi masyarakat untuk konsumsi. Oleh karena itu, semakin tinggi rasio sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga di desa maka diasumsikan semakin baik tingkat ketersediaan pangan di desa tersebut. dari 169 desa di Kabupaten Melawi, 26 desa masuk dalam prioritas 1 (15,38 %), 20 desa prioritas 2 ( 11,83 %) dan 49 desa prioritas 3 ( 29 %).

Tabel 2.8 Sebaran rasio sarana prasarana ekonomi berdasarkan prioritas

No.	Prioritas	Rasio Sarana Ekonomi	Jumlah Desa	Persentase
1	1	Sangat Rentan	26	15,38 %
2	2	Rentan	20	11,83 %
3	3	Agak Rentan	49	28,99 %
4	4	Agak Tahan	30	17,75 %
5	5	Tahan	36	21,30 %
6	6	Sangat Tahan	8	4,73 %

Grafik 2.2. Rasio Sarana



### 2.4. STRATEGI PEMENUHAN KETERSEDIAAN PANGAN

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Melawi dari tahun 2022 mencapai 1,74 % per tahun sementara pertumbuhan produksi padi menurun mencapai 6,05 % dari tahun 2021. Persentase luas lahan berdasarkan penggunaannya di Kabupaten Melawi adalah lahan pertanian bukan sawah 93,81 %, lahan sawah 1,42 % dan lahan bukan pertanian 4,77 %. Rasio sarana ekonomi penyedia



pangan pada prioritas 1-3 mencapai 56,2 %. Hal tersebut menjadi tantangan dalam pemenuhan ketersediaan pangan.

## 2.5. STRATEGI UNTUK MENINGKATKAN KETERSEDIAAN PANGAN.

Kebijakan kabupaten mengenai ketersediaan pangan pada periode 2022 - 2026 bertujuan untuk (i) meningkatkan produktivitas; (ii) perluasan lahan sawah; (iii) mengurangi dampak iklim-terkait resiko; (iv) memperkuat kelembagaan bagi petani. Strategi untuk masing-masing tujuan adalah sebagai berikut:

1. Ketahanan pangan terkait dengan rumah tangga atau individu yang memiliki akses ketersediaan pangan yang cukup, aman serta bergizi untuk memenuhi kebutuhan dalam menunjang kehidupan yang aktif dan sehat.
2. Untuk memenuhi kebutuhan pangan utama daerah serta mengurangi ketergantungan masuknya bahan pangan dari luar maka diharapkan menyediakan pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berasal dari sumberdaya lokal.
3. Penyelenggaraan urusan wajib ketahanan pangan di Kabupaten Melawi, selain berfokus kepada peningkatan ketersediaan jumlah dan peningkatan mutu pangan, Pemerintah Kabupaten Melawi juga melakukan program dalam rangka pemerataan distribusi, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, serta penguatan kelembagaan ketahanan pangan.
4. Sektor pertanian berkontribusi secara dominan dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Melawi. Pembangunan di bidang pertanian diarahkan untuk mewujudkan masyarakat pertanian yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing.
5. Upaya yang telah dilakukan Kabupaten Melawi dalam meningkatkan kinerja pembangunan di bidang pertanian diantaranya :
  - a. Mendorong pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan.
  - b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM pertanian.
  - c. Mendorong tumbuh kembangnya usaha pertanian yang dapat memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat.



## BAB III

### AKSES TERHADAP PANGAN

Keterjangkauan pangan atau akses terhadap pangan adalah kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan, baik yang berasal dari produksi sendiri, stok, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Pangan mungkin tersedia di suatu wilayah tetapi tidak dapat diakses oleh rumah tangga tertentu karena terbatasnya: (1) **Akses ekonomi**: kemampuan keuangan untuk membeli pangan yang cukup dan bergizi; (2) **Akses fisik**: keberadaan infrastruktur untuk mencapai sumber pangan; dan/atau (3) **Akses sosial**: modal sosial yang dapat digunakan untuk mendapatkan dukungan informal dalam mengakses pangan, seperti barter, pinjaman atau program jaring pengaman sosial. Dalam penyusunan FSVA Kabupaten, indikator yang digunakan dalam aspek keterjangkauan pangan hanya mewakili akses ekonomi dan fisik saja, yaitu: (1) Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa; dan (2) Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat, air atau udara.

#### 3.1 PENDUDUK DENGAN TINGKAT KESEJAHTERAAN TERENDAH

Berbagai program penanggulangan kemiskinan sudah dijalankan oleh pemerintah termasuk pemerintah Kabupaten Melawi Rasio kemiskinan telah berkurang dalam beberapa tahun terakhir, jumlah penduduk miskin Kabupaten Melawi terus mengalami penurunan dari 12.83 % (26.000 jiwa) tahun 2018 menjadi 11.44 % (25.000 jiwa) tahun 2022

Tabel 3.1 Persentase Populasi di Bawah Garis Kemiskinan Kabupaten Melawi

Keterangan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Persentase penduduk miskin</b>	<b>12.83</b>	<b>12.38</b>	<b>12.04</b>	<b>12.01</b>	<b>11.44</b>

Sumber: Kabupaten Dalam Angka, BPS

Pada tingkat desa berdasarkan data Data Program Keluarga Harapan Kabupaten Melawi tahun 2022, tidak terdapat desa yang memiliki rasio rumah tangga dengan dengan tingkat kesejahteraan terendah. Oleh karena itu, program-program penanggulangan kemiskinan Kabupaten ke depan harus lebih ditingkatkan dan diprioritaskan.

Tabel 3.2 Sebaran desa dengan tingkat kesejahteraan terendah berdasarkan skala prioritas

Prioritas	Range	Jumlah Desa	Persentase
1	$\geq 0.24$	0	0 %
2	0.15 - < 0.24	0	0 %
3	0.10 - < 0.15	0	0 %
4	0.05 - < 0.10	38	22.48 %
5	0.03 - < 0.05	75	44.38 %
6	< 0.03	56	33.14 %





### 3.2 AKSES TRANSPORTASI

Kurangnya akses terhadap infrastruktur menyebabkan kemiskinan, dimana masyarakat yang tinggal di daerah terisolir atau terpencil dengan kondisi geografis yang sulit dan ketersediaan pasar yang buruk kurang memiliki kesempatan ekonomi dan pelayanan jasa yang memadai. Dengan kata lain, kelompok miskin ini masih kurang mendapatkan akses terhadap program pembangunan pemerintah. Investasi pada infrastruktur, khususnya infrastruktur transportasi (jalan, pelabuhan, bandara dan lain-lain), listrik, infrastruktur pertanian (irigasi), fasilitas pendidikan dan kesehatan dapat sepenuhnya mengubah suatu wilayah sehingga menciptakan landasan pertumbuhan ekonomi dan partisipasi yang lebih besar dari masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.

Pada sektor pertanian, faktor yang menyebabkan tingkat pendapatan yang rendah adalah rendahnya harga komoditas pertanian di tingkat petani/produsen (*farm gate price*) di daerah perdesaan dibandingkan dengan harga di perkotaan untuk komoditas dengan kualitas sama (komoditas belum diubah atau diproses). Rendahnya harga komoditas pertanian ditingkat petani merupakan akibat dari tingginya biaya transportasi untuk pemasaran hasil pertanian dari desa surplus. Biaya transportasi akan lebih tinggi pada moda kendaraan bermotor-melewati jalan setapak dan jalan kecil dengan tenaga manusia atau hewan, misalnya pada daerah yang tidak memiliki akses jalan yang memadai. Dalam sebuah kajian cepat mengenai penyebab kemiskinan pada desa terpencil di 5 kabupaten di Indonesia diketahui bahwa tingginya biaya transportasi merupakan penyebab utama terjadinya kemiskinan tersebut. Tingginya harga komoditas pertanian di tingkat petani akan meningkatkan pendapatan yang diterima oleh masyarakat petani. Walaupun demikian, peningkatan pendapatan saja tanpa dibarengi dengan perbaikan akses terhadap pelayanan jasa dan infrastruktur belum cukup untuk menjamin kesejahteraan masyarakat petani.

Keterbelakangan infrastruktur menghalangi laju perkembangan suatu wilayah. Infrastruktur yang lebih baik akan menarik investasi yang lebih besar pada berbagai sektor, yang pada akhirnya dapat menjadi daya dorong bagi kehidupan yang berkelanjutan.

Berdasarkan data PODES (Potensi Desa) 2018, BPS, di Kabupaten Melawi, hampir semua desa memiliki akses penghubung bagi kendaraan roda 4 sepanjang tahun. Desa yang bisa dilalui kendaraan roda 4 sepanjang tahun kecuali saat tertentu (ketika turun hujan, longsor, pasang, dll) terdapat di Kecamatan Tanah Pinoh (Desa Tanjung Gunung, Kecamatan Sokan (Desa Teluk Pongkal) dan Kecamatan Tanah Pinoh Barat (Desa Keluas Hulu, Ganjang dan Togan Baru).

Jalan merupakan moda transportasi utama di Kabupaten Melawi akan tetapi terdapat beberapa kecamatan di mana moda transportasi air masih menjadi bagian penting dari moda transportasinya. Kondisi geografis hanya memungkinkan menggunakan moda transportasi air. Masyarakat menggunakan perahu motor sebagai moda transportasinya.

### 3.3 STRATEGI PENINGKATAN AKSES PANGAN

Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi untuk menanggulangi kemiskinan seperti yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Melawi tahun 2022-2026 diantaranya:

- Mengoptimalkan penyediaan sarana dan prasarana pertanian
- Mengoptimalkan pengelolaan ketahanan pangan



- Mengembangkan usaha agribisnis dan agroindustri guna meningkatkan nilai tambah produk pertanian, perikanan, pangan, perkebunan dan perternakan
- Meningkatkan ketahanan social budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara ketahanan sosial
- Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan daerah
- Mengoptimalkan tata kelola niaga melalui peningkatan akses pemasaran hasil usaha industri kecil dan menengah yang kreatif dan luas
- Meningkatkan tenaga kerja terampil dalam mendukung hilirisasi produk unggulan daerah, pengembangan pariwisata dan pemanfaatan teknologi tepat guna
- Pemantapan dan pemeliharaan kapasitas dan kualitas jalan, jembatan dan sistem drainase.
- Optimalisasi pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan masyarakat miskin



## BAB IV PEMANFAATAN PANGAN

Aspek ketiga dari konsep ketahanan pangan adalah pemanfaatan pangan. Pemanfaatan pangan meliputi: (1) Pemanfaatan pangan yang bisa di akses oleh rumah tangga; dan (2) Kemampuan individu untuk menyerap zat gizi secara efisien oleh tubuh. Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan, dan penyajian makanan termasuk penggunaan air selama proses pengolahannya serta kondisi budaya atau kebiasaan dalam pemberian makanan terutama kepada individu yang memerlukan jenis pangan khusus sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu (saat masa pertumbuhan, kehamilan, menyusui, dll) atau status kesehatan masing-masing individu. Dalam penyusunan FSVA Kabupaten, aspek pemanfaatan pangan meliputi indikator sebagai berikut: (1) Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga; dan (2) Rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk.

### 4.1 AKSES TERHADAP AKSES AIR BERSIH

Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga Desil 1-4 dengan sumber air bersih tidak terlindung dengan jumlah rumah tangga di desa. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak<sup>4</sup>. Sumber air bersih yang tidak terlindungi berpotensi meningkatkan angka kesakitan serta menurunkan kemampuan dalam menyerap makanan yang pada akhirnya akan mempengaruhi status gizi individu.

Tabel 4.1 Sebaran desa berdasarkan rumah tangga tanpa akses air bersih berdasarkan skala prioritas

Prioritas	Range	Jumlah Desa	Persentase
1	≥ 0.59	13	7.69%
2	0.48 - < 0.59	12	7.10%
3	0.32 - < 0.48	31	18.34%
4	0.21 - < 0.32	23	13.60%
5	0.08 - < 0.21	49	28.99%
6	< 0.08	41	24.26%

### 4.2 RASIO TENAGA KESEHATAN

Rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan yang terdiri dari: (1) Dokter umum/spesialis; (2) Dokter gigi; (3) Bidan; dan (4) Tenaga kesehatan lainnya (perawat, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, apoteker/asisten apoteker) dibandingkan dengan kepadatan penduduk. Tenaga kesehatan berperan penting dalam menurunkan angka kesakitan penduduk (morbiditas) dan meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya makanan yang beragam bergizi seimbang dan aman.

Rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk menunjukkan kemampuan jumlah tenaga kesehatan yang ada di wilayah desa untuk melayani masyarakat. Jumlah tenaga kesehatan yang memadai akan meningkatkan status pemanfaatan pangan masyarakat.

<sup>4</sup> Permenkes 416 Tahun 1990



Tabel 3.2 Sebaran rasio tenaga kesehatan di desa berdasarkan skala prioritas

Prioritas	Range	Jumlah Desa	Persentase
1	$\geq 0.78$	39	23.07%
2	$0.53 - < 0.78$	22	13.01%
3	$0.27 - < 0.53$	30	17.75%
4	$0.15 - < 0.27$	29	17.15%
5	$0.6 - < 0.15$	26	15.38%
6	$< 0.6$	23	13.60%

### 4.3 DAMPAK (OUTCOME) DARI STATUS KESEHATAN

Ketahanan pangan merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi status kesehatan dan gizi masyarakat. Status gizi anak ditentukan oleh asupan makanan dan penyakit yang dideritanya. Status gizi anak balita diukur dengan 3 indikator yaitu:

1. Berat Badan Kurang dan Berat Badan Sangat Kurang yang biasa dikenal dengan underweight (berat badan berdasarkan umur (BB/U) dengan Zscore dari-2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu kepada gabungan dari kurang gizi akut dan kronis);
2. Pendek atau stunting (tinggi badan berdasarkan umur (TB/U) dengan Zscore kurang dari-2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu ke kurang gizi kronis jangka panjang); dan
3. Kurus atau wasting (berat badan berdasarkan tinggi badan (BB/TB) dengan Zscore kurang dari-2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu kepada kurang gizi akut atau baru saja mengalami kekurangan gizi).

Jumlah penderita gizi buruk di Kabupaten Melawi pada tahun 2022 sebanyak 411 balita. Jumlah penderita gizi buruk yang tinggi ditemukan di Kecamatan Sokan (131 balita) dan terendah ditemukan di Kecamatan Belimbing Hulu ( 10 balita).

Tabel 4.2 Penderita Gizi Buruk 2018-2022

No.	Kecamatan	Penderita Gizi Buruk				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Sokan	44	0	0	0	131
2	Tanah Pinoh	0	0	0	0	38
3	Tanah Pinoh Barat	46	0	0	0	18
4	Sayan	8	0	1	0	25
5	Belimbing	57	0	0	0	33
6	Belimbing Hulu	39	0	0	0	10
7	Nanga Pinoh	81	0	0	0	49
8	Pinoh Selatan	44	0	0	0	22
9	Pinoh Utara	42	0	0	0	25
10	Ella Hilir	29	0	1	0	33
11	Menukung	37	0	0	0	27
	<b>Total</b>	<b>427</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>411</b>

Angka kematian balita dan ibu saat melahirkan merupakan dampak dari status kesehatan dan gizi. Angka kematian balita di Kabupaten Melawi adalah 0 jiwa. Sementara angka kematian ibu saat melahirkan di Kabupaten Melawi 8 jiwa. Angka kematian ibu saat melahirkan tertinggi di Kecamatan



Tanah Pinoh (2 jiwa) dan Kecamatan Nanga Pinih (2 Jiwa) Untuk lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Jumlah Kematian Balita dan Ibu Saat Melahirkan per Kecamatan 2022

No.	Kecamatan	Jumlah Kematian Balita	Jumlah Kematian Ibu Saat Melahirkan	Total
1	Sokan	-	-	-
2	Tanah Pinoh	-	2	2
3	Tanah Pinoh Barat	-	1	1
4	Sayan	-	1	1
5	Belimbing	-	-	-
6	Belimbing Hulu	-	-	-
7	Nanga Pinoh	-	2	2
8	Pinoh Selatan	-	-	-
9	Pinoh Utara	-	1	1
10	Ella Hilir	-	-	-
11	Menukung	-	1	1
	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>

Sumber : Kabupaten Melawi Dalam Angka 2023, BPS

#### 4.4. STRATEGI PENINGKATAN PEMANFAATAN PANGAN

Masalah gizi kronis (stunting) masih tetap tinggi di Kabupaten Melawi, masalah gizi kronis merupakan akibat kurang optimalnya pertumbuhan janin dan bayi di usia dua tahun pertama kehidupannya, terutama gabungan dari kurangnya asupan gizi, paparan terhadap penyakit yang tinggi serta pola pengasuhan yang kurang tepat. Semua faktor ini dapat menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki, yang akhirnya dapat menyebabkan meningkatnya beban penyakit dan kematian pada balita.

Kurang gizi pada usia dini, terutama stunting dapat menghambat perkembangan fisik dan mental yang akhirnya mempengaruhi prestasi dan tingkat kehadiran di sekolah. Anak yang kurang gizi lebih cenderung untuk masuk sekolah lebih lambat dan lebih cepat putus sekolah. Dampak ke masa depannya adalah mempengaruhi potensi kemampuan mencari nafkah, sehingga sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Anak yang menderita kurang berat badan menurut umur (kurang gizi) dan secara cepat berat badannya meningkat, maka pada saat dewasa cenderung untuk menderita penyakit kronik yang terkait gizi (kencing manis, tekanan darah tinggi dan penyakit jantung koroner). Dampak jangka panjang, oleh kurang gizi pada masa anak-anak juga menyebabkan rendahnya tinggi badan dan pada ibu-ibu dapat melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR), yang akhirnya menyebabkan terulangnya lingkaran masalah ini pada generasi selanjutnya.

Untuk menurunkan prevalensi stunting, maka intervensi gizi harus segera direncanakan dan dilakukan secara efektif pada semua tingkatan, mulai dari rumah tangga sampai tingkat nasional. Untuk mencegah dan mengatasi masalah kekurangan gizi secara efektif, perlu prioritas untuk kelompok rentan gizi, memahami penyebab kurang gizi adalah multidimensi, intervensi yang tepat dan



efektif untuk mengatasi penyebabnya, dan meningkatkan komitmen serta investasi dalam bidang gizi. Berikut ini adalah rekomendasi untuk mengatasi masalah gizi:

1. Fokus pada kelompok rentan gizi, termasuk:
  - a. Anak usia di bawah dua tahun. Usia dua tahun pertama di dalam kehidupan adalah usia yang paling kritis sehingga disebut “jendela peluang (*window of opportunity*)” karena mencegah kurang gizi pada usia ini akan sangat berarti untuk kelompok ini pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Meskipun kerusakan sudah terjadi dan seharusnya dihindari sejak dari usia 9 bulan sampai usia 24 bulan, kerentanan anak terhadap penyakit dan resiko kematian masih tinggi di usia lima tahun pertama. Itulah sebabnya banyak intervensi kesehatan dan gizi yang difokuskan pada anak di bawah lima tahun. Intervensi kesehatan dan gizi harus difokuskan pada anak di bawah dua tahun, akan tetapi apabila anggaran memadai maka perlu dilakukan juga untuk anak di bawah lima tahun.
  - b. Anak-anak kurang gizi ringan. Kelompok ini memiliki resiko lebih tinggi untuk meninggal karena meningkatnya kerentanan terhadap infeksi. Anak yang terdeteksi kurang gizi seharusnya di rawat dengan tepat untuk mencegah mereka menjadi gizi buruk.
  - c. Ibu hamil dan menyusui, karena kelompok ini memerlukan kecukupan gizi bagi pertumbuhan dan perkembangan janin, dan untuk menghasilkan ASI (Air Susu Ibu) untuk bayi mereka.
  - d. Kurang gizi mikro untuk semua kelompok umur, terutama pada anak-anak, ibu hamil dan menyusui. Kekurangan gizi mikro pada semua kelompok umur cukup tinggi disebabkan karena asupan karbohidrat yang tinggi, rendahnya asupan protein (hewani) sayur dan buah serta makanan yang berfortifikasi. Pada kondisi ini biasanya prevalensi stunting pada balita juga cukup tinggi.
2. Perencanaan dan penerapan intervensi multi-sektoral untuk mengatasi TIGA penyebab dasar kekurangan gizi (pangan, kesehatan dan pengasuhan).

Satu sektor saja (sektor kesehatan atau pendidikan atau pertanian) tidak dapat mengatasi masalah gizi secara efektif karena masalah tersebut adalah multi sektor.

  - a. Intervensi langsung dengan manfaat langsung terhadap gizi (terutama melalui Sektor Kesehatan):
    - Memperbaiki gizi dan pelayanan ibu hamil, terutama selama 2 trimester pertama usia kehamilan: makan lebih sering, beraneka ragam, dan bergizi; minum pil besi atau menggunakan suplemen gizi mikro tabor (Sprinkle) setiap hari; memeriksakan kehamilan sekurangngnya 4 kali selama periode kehamilan.
    - Promosi menyusui ASI selama 0-24 bulan: inisial menyusui dini segera sesudah bayi lahir; menyusui ASI eksklusif sampai 6 bulan pertama, melanjutkan pemberian ASI sampai 24 bulan; melanjutkan menyusui walaupun anak sakit.
    - Meningkatkan pola pemberian makanan tambahan untuk anak usia 6-24 bulan; mulai pemberian makanan tambahan sejak anak berusia 7 bulan; pemberian makanan lebih sering, jumlah sedikit, beraneka ragam dan bergizi (pangan hewani, telur, kacang-kacangan, polong-polongan, kacang tanah, sayur, buah dan minyak); hindari pemberian jajan yang tidak sehat.
    - Pemantauan berat dan tinggi badan bayi 0-24 bulan atau jika sumber daya memungkinkan, untuk anak 0-59 bulan secara teratur, untuk mendeteksi kurang gizi secara dini sehingga bias dilakukan intervensi sedini mungkin. Meningkatkan komunikasi mengenai berat badan anak, cara mencegah dan memperbaiki kegagalan berat dan tinggi anak dengan keluarga.



- Mengatasi masalah kurang gizi akut pada balita dengan menyediakan fasilitas dan manajemen berbasis masyarakat berdasarkan pedoman dari WHO/UNICEF dan Departemen Kesehatan.
  - Memperbaiki asupan gizi mikro: promosi garam beryodium; panganekaragaman asupan makanan; fortifikasi makanan; pemberian bil besi untuk ibu hamil; pemberian vitamin A setiap 6 bulan sekali untuk anak 6-24 bulan (atau anak 6-59 bulan jika alokasi anggaran mencukupi), serta ibu menyusui dalam jangka waktu 1 bulan setelah melahirkan atau masa nifas; pemberian obat cacing.
- b. Intervensi tidak langsung dengan manfaat tidak langsung terhadap gizi (terutama melalui sektor di luar kesehatan)
3. Prioritas dan peningkatan investasi serta komitmen dalam hal gizi untuk mengatasi masalah gizi. Dampak ekonomi akibat kekurangan gizi pada anak-anak adalah sangat tinggi. Kekurangan gizi pada anak akan menyebabkan hilangnya produktivitas pada masa dewasa, dan tingginya biaya pelayanan kesehatan dan pendidikan. Ada beberapa macam bentuk dari malnutrisi pada masa anak-anak yang dapat menyebabkan hilangnya produktivitas mereka pada masa dewasa yang berkaitan dengan rendahnya kemampuan kognitif. Kekurangan energi-protein berkontribusi sebesar 10% dari hilangnya produktivitas pada masa dewasa, kekurangan zat besi (anemia) berkontribusi sebesar 4% dan kekurangan zat yodium sebesar 10%. Malnutrisi pada masa anak-anak juga berpotensi menyebabkan hilangnya produktivitas tenaga kerja kasar.

Investasi di bidang gizi merupakan salah satu jenis intervensi pembangunan yang paling efektif dari segi biaya, karena memiliki rasio manfaat-biaya yang tinggi, bukan hanya untuk individu, tetapi juga pembangunan negara yang berkelanjutan, sebab intervensi ini dapat melindungi kesehatan, mencegah kecacatan dan dapat memacu produktivitas ekonomi dan menjaga kelangsungan hidup.



## BAB V

### KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOMPOSIT

Sebagaimana disebutkan di dalam Bab 1, bahwa kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan kronis secara komposit ditentukan berdasarkan 6 indikator yang berhubungan dengan ketersediaan pangan, akses pangan dan penghidupan, serta pemanfaatan pangan dan gizi, yang dijelaskan secara rinci pada Bab Dua, Tiga dan Empat. Peta kerentanan terhadap kerawanan pangan komposit (Peta 6.1) ditetapkan melalui Analisis Pembobotan.

#### 5.1. KONDISI KETAHANAN PANGAN

Peta komposit menjelaskan kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan suatu wilayah (kecamatan) yang disebabkan oleh kombinasi dari berbagai dimensi kerawanan pangan. Berdasarkan hasil pembobotan, desa-desa dikelompokkan ke dalam 6 prioritas. Prioritas 1 merupakan prioritas utama yang menggambarkan tingkat kerentanan yang paling tinggi, sedangkan prioritas 6 merupakan prioritas yang relatif lebih tahan pangan. Dengan kata lain, wilayah (desa) prioritas 1 memiliki tingkat resiko kerentanan terhadap kerawanan pangan yang lebih besar dibandingkan wilayah (desa) lainnya sehingga memerlukan perhatian segera. Meskipun demikian, wilayah (desa) yang berada pada prioritas 1 tidak berarti semua penduduknya berada dalam kondisi rawan pangan, juga sebaliknya wilayah (desa) pada prioritas 6 tidak berarti semua penduduknya tahan pangan.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dari 169 desa yang ada di Kabupaten Melawi maka didapatkan 0 desa (Prioritas 1), 4 desa (Prioritas 2), 24 desa (Prioritas 3), 51 desa (Prioritas 4), 56 desa (Prioritas 5) dan 33 desa (Prioritas 6).

Tabel 5.1. Sebaran Jumlah Desa berdasarkan Prioritas

Prioritas	Jumlah Desa	Persentase
1	0	0 %
2	4	2.37%
3	24	14.20%
4	51	30.18%
5	56	33.14%
6	33	20.12%

Desa rentan terhadap kerawanan pangan prioritas 2 terdapat di wilayah Kecamatan Sokan (1 desa), yaitu desa Teluk Pongkal dan Kecamatan Tanah Pinoh Barat (3 desa), yaitu desa Togan Baru, Ganjang dan Harapan Jaya.

Desa rentan terhadap kerawanan pangan prioritas 3 terdapat di wilayah Kecamatan Sokan ( 4 desa), Kecamatan Tanah Pinoh Barat (6 desa), Kecamatan Belimbing (1 desa), Kecamatan Pinoh





Selatan (1 desa), Kecamatan Pinoh Utara (4 desa), Kecamatan Ella Hilir (5 Desa) dan Kecamatan Menukung ( 3 desa) (Gambar 5.3).

## **5.2. FAKTOR PENYEBAB KERENTANAN PANGAN**

Desa rentan terhadap kerawanan pangan Prioritas 1, 2 dan 3 secara umum disebabkan oleh: (1) Rasio Jumlah Penduduk Desa Per Tenaga Kesehatan Terhadap Kepadatan Penduduk , (2) Rasio Jumlah Prasarana dan Sarana Penyedia Pangan Terhadap Jumlah Rumah Tangga, dan (3) Rasio Jumlah Rumah Tangga Tanpa Akses Air Bersih Terhadap Jumlah Rumah Tangga.



## BAB VI

### REKOMENDASI KEBIJAKAN

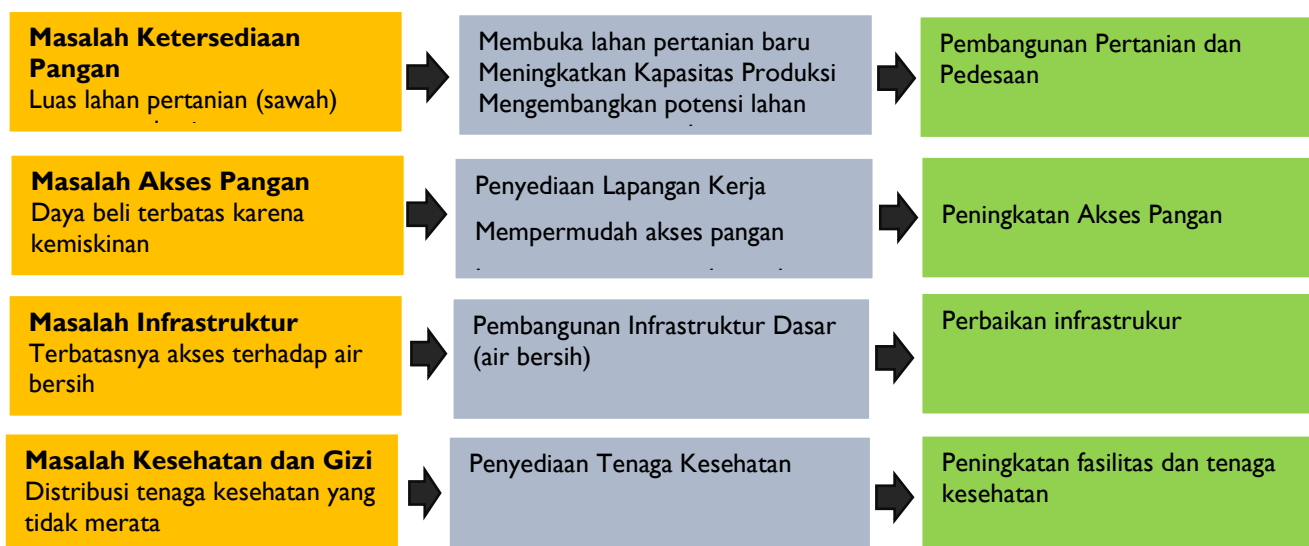
Penyebab kerentanan terhadap kerawanan pangan pada suatu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya, dengan demikian cara penyelesaiannya juga berbeda. Peta ini membantu memahami keadaan diantara wilayah (desa), dan dengan demikian akan membantu para pengambil kebijakan untuk dapat menentukan langkah-langkah yang tepat dalam menangani isu-isu ketahanan pangan yang relevan di wilayahnya.

Fokus lokasi penanganan kerentanan pangan di wilayah desa diprioritaskan pada:

- Tidak ada Desa yang masuk dalam Prioritas 1 (Sangat Rentan).
- Desa-desa prioritas 2 (Rentan) yang tersebar di 1 Desa Kecamatan Sokan dan 3 Desa Kecamatan Tanah Pinoh Barat.
- Desa-desa prioritas 3 (Agak Rentan) yang tersebar di 4 Desa Kecamatan Sokan, 6 Desa Kecamatan Tanah Pinoh Barat, 1 Desa di Kecamatan Belimbing, 1 Desa di Kecamatan Pinoh Selatan, 4 Desa di Kecamatan Pinoh Utara, 5 Desa di Kecamatan Ella Hilir dan 3 Desa di Kecamatan Menukung.
- Desa-desa yang lokasinya jauh dari ibu kota kabupaten atau di wilayah yang berbatasan dengan kabupaten lain.
- Desa-desa pemekaran yang fasilitas, infrastruktur dan kapasitas SDMnya masih terbatas.

Upaya-upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan ditekankan pada penyebab utama kerentanan pangan di desa seperti digambarkan pada diagram di bawah ini.

**Gambar 6.1 Kerangka Intervensi untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan**



Program-program peningkatan ketahanan pangan dan penanganan kerentanan pangan wilayah kabupaten diarahkan pada kegiatan:



- a. Peningkatan penyediaan pangan di daerah non sentra produksi dengan mengoptimalkan sumberdaya pangan lokal.
- b. Pembukaan lahan pertanian pertanian baru
- c. Penanganan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja, padat karya, redistribusi lahan; pembangunan infrastruktur dasar (jalan, air bersih), dan pemberian bantuan sosial; serta pembangunan usaha produktif/UMKM/padat karya untuk menggerakkan ekonomi wilayah.
- d. Peningkatan akses air bersih melalui penyediaan fasilitas dan layanan air bersih; sosialisasi dan penyuluhan.
- e. Penyediaan tenaga kesehatan.



# LAMPIRAN



## Data Indeks Ketersediaan, Keterjangkauan dan Pemanfaatan Wilayah Desa 2023

No.	KECAMATAN	DESA	INDEKS KETERSEDIAAN	INDEKS AKSES	INDEKS PEMANFAATAN	INDEKS KOMPOSIT
1	SOKAN	NANGA ORA	10,40	76,94	63,98	50,44
2	SOKAN	NANGA LIBAS	16,06	78,37	60,11	51,51
3	SOKAN	GELATA	25,81	77,68	64,08	55,86
4	SOKAN	NANGA BETANGAI	22,05	80,80	77,35	60,07
5	SOKAN	KELUING TAJA	27,43	76,15	77,06	60,21
6	SOKAN	SIJAU	16,08	77,31	96,51	63,30
7	SOKAN	TANJUNG SOKAN	18,94	96,77	81,34	65,68
8	SOKAN	NANGA SOKAN	13,64	80,71	86,37	60,24
9	SOKAN	PENYENGKUANG	10,98	75,92	58,61	48,50
10	SOKAN	NANGA TANGKIT	8,20	76,94	61,26	48,80
11	SOKAN	LANDAU KABU	18,73	77,18	73,84	56,58
12	SOKAN	MELANA	15,51	80,45	75,62	57,19
13	SOKAN	TANJUNG MAHUNG	17,78	77,83	79,82	58,48
14	SOKAN	TELAGA RAYA	19,33	77,23	87,62	61,39
15	SOKAN	TELUK PONGKAL	20,83	61,93	48,43	43,73
16	SOKAN	MUARA TANJUNG	32,59	79,81	90,38	67,59
17	SOKAN	NANGA POTAI	18,49	94,06	98,67	70,41
18	SOKAN	SEPAKAT	6,82	97,30	90,42	64,85
19	TANAH PINOH	MADONG RAYA	39,58	96,35	93,43	76,46
20	TANAH PINOH	LOKA JAYA	31,63	79,08	87,94	66,22
21	TANAH PINOH	BATU BEGIGI	22,06	94,93	94,10	70,36
22	TANAH PINOH	BINA KARYA	50,09	94,28	86,77	77,05
23	TANAH PINOH	BINA JAYA	60,52	94,42	92,46	82,46
24	TANAH PINOH	SUKA MAJU	33,29	79,71	95,51	69,50
25	TANAH PINOH	BATA LUAR	59,12	91,08	85,22	78,47
26	TANAH PINOH	KERANJIK	40,10	80,60	95,84	72,18
27	TANAH PINOH	PELITA KENAYA	54,59	78,16	87,26	73,34
28	TANAH PINOH	MARIS PERMAI	53,42	78,82	81,97	71,40
29	TANAH PINOH	TANJUNG BERINGIN RAYA	26,11	74,86	88,63	63,20
30	TANAH PINOH	TANJUNG GUNUNG	28,17	93,54	94,59	72,10
31	TANAH PINOH BARAT	TOGAN BARU	11,20	62,44	60,27	44,64
32	TANAH PINOH BARAT	GANJANG	13,30	62,49	45,10	40,30
33	TANAH PINOH BARAT	DURIAN JAYA	26,73	64,05	53,34	48,04
34	TANAH PINOH BARAT	PELITA JAYA	11,15	63,17	83,65	52,66
35	TANAH PINOH BARAT	BUKIT RAYA	40,16	81,90	80,64	67,57
36	TANAH PINOH BARAT	ULAK MUID	13,51	79,79	68,86	54,06
37	TANAH PINOH BARAT	LINTAH TAUM	23,87	75,12	63,22	54,07
38	TANAH PINOH BARAT	LAJA	11,52	77,81	50,69	46,68
39	TANAH PINOH BARAT	HARAPAN JAYA	7,52	60,45	58,66	42,21
40	TANAH PINOH BARAT	KELUAS HULU	16,45	61,74	60,28	46,15
41	SAYAN	MADYA RAYA	17,35	81,89	73,41	57,55
42	SAYAN	LANDAU SADAK	24,79	77,60	69,97	57,46
43	SAYAN	PEKAWAI	21,18	96,90	66,84	61,64



No.	KECAMATAN	DESA	INDEKS KETERSEDIAAN	INDEKS AKSES	INDEKS PEMANFAATAN	INDEKS KOMPOSIT
44	SAYAN	MEKAR PELITA	34,80	97,02	88,04	73,29
45	SAYAN	NANGA SAYAN	23,45	95,86	80,48	66,60
46	SAYAN	KERANGAN PURUN	59,57	77,60	77,35	71,51
47	SAYAN	BORA	20,26	98,84	84,56	67,89
48	SAYAN	NANGA KOMPI	36,78	82,25	78,34	65,79
49	SAYAN	NANGA MANCUR	24,64	80,49	65,07	56,73
50	SAYAN	TUMBAK RAYA	23,87	80,75	69,46	58,03
51	SAYAN	NANGA RAKU	22,73	80,10	69,09	57,31
52	SAYAN	META BERSATU	27,82	80,96	71,67	60,15
53	SAYAN	NANGA KASAI	21,08	96,05	81,71	66,28
54	SAYAN	SILING PERMAI	14,74	97,48	74,13	62,12
55	SAYAN	LINGKAR INDAH	16,00	95,84	88,45	66,77
56	SAYAN	SAYAN JAYA	19,22	98,22	90,30	69,25
57	SAYAN	NANGA PAK	53,07	63,94	88,64	68,55
58	SAYAN	BEROBAI PERMAI	30,44	78,78	77,83	62,35
59	BELIMBING	BALAI AGAS	13,90	77,20	65,19	52,10
60	BELIMBING	LANGAN	17,34	75,61	71,31	54,75
61	BELIMBING	NUSA KENYIKAP	24,09	96,90	91,57	70,85
62	BELIMBING	UPIT	28,62	79,71	77,06	61,80
63	BELIMBING	BATU AMPAR	30,60	96,70	77,57	68,29
64	BELIMBING	PEMUAR	18,53	97,03	96,71	70,76
65	BELIMBING	BATU BUIL	20,44	98,42	95,85	71,57
66	BELIMBING	GUHUNG	22,22	96,93	96,42	71,86
67	BELIMBING	BELONSAT	13,64	97,59	90,27	67,16
68	BELIMBING	BATU NANTA	10,14	99,46	97,33	68,98
69	BELIMBING	LAMAN BUKIT	13,93	98,57	92,92	68,48
70	BELIMBING	NANGA PAU	13,92	79,05	70,78	54,58
71	BELIMBING	NANGA ENTEBAH	43,72	78,87	71,08	64,56
72	BELIMBING	TEKABAN	29,70	95,24	77,11	67,35
73	BELIMBING	LABANG	25,63	98,40	92,21	72,08
74	BELIMBING	NANGA MENUNUK	24,21	98,51	80,08	67,60
75	BELIMBING	SEPAN TONAK	37,58	81,91	83,48	67,66
76	BELIMBING HULU	NANGA RAYA	27,39	77,48	80,99	61,95
77	BELIMBING HULU	KAYU BUNGA	13,27	79,91	84,78	59,32
78	BELIMBING HULU	NANGA KEBERAK	15,82	79,08	94,55	63,15
79	BELIMBING HULU	PIAWAS	18,74	94,77	88,85	67,45
80	BELIMBING HULU	JUNJUNG PERMAI	14,44	77,33	95,97	62,58
81	BELIMBING HULU	NANGA TIKAN	1,69	94,29	90,44	62,14
82	BELIMBING HULU	TIONG KERANJIK	26,46	96,57	99,94	74,32
83	BELIMBING HULU	BELOYANG	8,96	98,56	93,10	66,87
84	NANGA PINOH	NANGA KEBEBU	58,07	99,21	90,92	82,73
85	NANGA PINOH	PORING	58,59	99,21	86,42	81,41
86	NANGA PINOH	TANJUNG SARI	20,36	99,21	98,39	72,65
87	NANGA PINOH	TEMAWANG PANJANG	31,12	98,08	97,77	75,66



No.	KECAMATAN	DESA	INDEKS KETERSEDIAAN	INDEKS AKSES	INDEKS PEMANFAATAN	INDEKS KOMPOSIT
88	NANGA PINOH	PAAL	19,88	99,74	98,28	72,63
89	NANGA PINOH	TANJUNG NIAGA	24,64	99,61	98,01	74,09
90	NANGA PINOH	SIDO MULYO	24,94	99,79	99,44	74,72
91	NANGA PINOH	B A R U	12,91	99,27	95,80	69,33
92	NANGA PINOH	NANGA KAYAN	18,76	64,21	86,73	56,57
93	NANGA PINOH	NUSA PANDAU	20,88	95,28	88,91	68,36
94	NANGA PINOH	TEBING KARANGAN	31,71	79,08	91,10	67,30
95	NANGA PINOH	KELAKIK	12,56	99,29	100,00	70,62
96	NANGA PINOH	SEMADIN LENGKONG	43,91	98,75	93,31	78,66
97	NANGA PINOH	TANJUNG LAY	2,42	97,77	97,06	65,75
98	NANGA PINOH	LABAI MANDIRI	72,23	81,16	91,74	81,71
99	NANGA PINOH	KENUAL	7,52	98,60	96,88	67,67
100	NANGA PINOH	TANJUNG TENGANG	22,15	99,01	97,62	72,93
101	PINOH SELATAN	NANGA PINTAS	25,99	95,96	90,33	70,76
102	PINOH SELATAN	MANDAU BARU	12,54	95,89	79,04	62,49
103	PINOH SELATAN	NANGA KELAWAI	22,53	96,01	97,72	72,08
104	PINOH SELATAN	SENEMPAK	20,85	80,31	96,66	65,94
105	PINOH SELATAN	LANDAU GARONG	28,86	96,24	85,19	70,10
106	PINOH SELATAN	SUNGAI BAKAH	12,75	96,19	84,33	64,43
107	PINOH SELATAN	NYANGGAI	13,29	95,37	85,56	64,74
108	PINOH SELATAN	BAYUR RAYA	31,11	95,04	75,59	67,24
109	PINOH SELATAN	BINA JAYA	22,95	75,69	63,16	53,93
110	PINOH SELATAN	PELINGGANG	43,43	79,90	72,32	65,22
111	PINOH SELATAN	MANGGALA	12,65	97,45	95,74	68,61
112	PINOH SELATAN	LANDAU TUBUN	19,40	96,23	95,54	70,39
113	PINOH UTARA	SUNGAI PINANG	28,54	78,12	80,25	62,30
114	PINOH UTARA	ENKURAI	10,99	77,82	76,79	55,20
115	PINOH UTARA	MERPAK	12,48	78,67	67,57	52,91
116	PINOH UTARA	NANGA MAN	5,78	80,75	84,21	56,91
117	PINOH UTARA	MERAH ARAI	60,62	74,71	56,07	63,80
118	PINOH UTARA	TANJUNG ARAK	11,73	80,78	87,05	59,85
119	PINOH UTARA	TANJUNG PAOH	42,80	81,30	88,14	70,74
120	PINOH UTARA	TEKELAK	8,59	80,53	88,78	59,30
121	PINOH UTARA	MELAWI KIRI HILIR	17,78	77,31	84,97	60,02
122	PINOH UTARA	KOMPAS RAYA	9,17	97,06	92,44	66,23
123	PINOH UTARA	MANDING	41,32	77,21	81,16	66,56
124	PINOH UTARA	NATAI PANJANG	44,02	75,47	66,88	62,12
125	PINOH UTARA	SUNGAI RAYA	4,77	77,18	68,87	50,27
126	PINOH UTARA	NANGA BELIMBING	13,76	96,51	78,95	63,08
127	PINOH UTARA	SUKA DAMAI	21,45	75,59	72,69	56,57
128	PINOH UTARA	TENGAJAU	7,62	74,90	69,05	50,52
129	PINOH UTARA	SENIBUNG	31,32	76,44	58,05	55,27
130	PINOH UTARA	MELAMUT BERSATU	52,77	78,91	59,49	63,72
131	PINOH UTARA	KAYAN SEMAPAU	25,16	75,27	49,99	50,14



No.	KECAMATAN	DESA	INDEKS KETERSEDIAAN	INDEKS AKSES	INDEKS PEMANFAATAN	INDEKS KOMPOSIT
132	ELLA HILIR	PENYUGUK	6,45	96,24	78,24	60,31
133	ELLA HILIR	KERANGAN KORA	8,23	74,85	78,30	53,79
134	ELLA HILIR	NANGA KEMPANGAI	11,50	75,28	72,51	53,10
135	ELLA HILIR	NANGA NYURUH	14,97	77,47	72,63	55,02
136	ELLA HILIR	NANGA KALAN	38,06	78,26	78,08	64,80
137	ELLA HILIR	NANGA ELLA HILIR	15,36	96,39	95,86	69,20
138	ELLA HILIR	NANGA NUAK	36,29	95,45	87,86	73,20
139	ELLA HILIR	LENGKONG NYADOM	20,67	63,82	89,12	57,87
140	ELLA HILIR	JABAI	15,66	75,56	78,31	56,51
141	ELLA HILIR	SUNGAI LABUK	1,85	76,92	76,67	51,81
142	ELLA HILIR	PEREMBANG NYURUH	6,76	77,67	80,27	54,90
143	ELLA HILIR	KAHIYA	14,43	76,62	78,80	56,62
144	ELLA HILIR	BEMBAN PERMAI	14,90	78,40	80,06	57,79
145	ELLA HILIR	PELEMPAI JAYA	28,65	95,83	96,44	73,64
146	ELLA HILIR	POPAI	74,19	97,24	84,29	85,24
147	ELLA HILIR	DOMET PERMAI	22,85	80,92	91,30	65,02
148	ELLA HILIR	NYANGGAU	25,17	94,73	88,51	69,47
149	ELLA HILIR	SUNGAI MENTOBA	17,12	62,49	77,47	52,36
150	ELLA HILIR	NATAI COMPA	5,40	62,66	86,07	51,38
151	MENUKUNG	NANGA SIYAI	10,75	95,85	84,27	63,62
152	MENUKUNG	LAMAN MUMBUNG	9,99	62,00	67,60	46,53
153	MENUKUNG	MAWANG MENTATAI	10,93	78,96	75,71	55,20
154	MENUKUNG	MELONA	13,47	75,57	91,44	60,16
155	MENUKUNG	MENUKUNG KOTA	20,17	96,64	97,96	71,59
156	MENUKUNG	NANGA ELLA HULU	20,49	96,60	80,57	65,89
157	MENUKUNG	TANJUNG BERINGIN	16,38	79,25	68,72	54,79
158	MENUKUNG	LANDAU LEBAN	34,59	79,59	90,10	68,09
159	MENUKUNG	SUNGAI SAMPUK	9,17	80,37	78,55	56,03
160	MENUKUNG	BELABAN ELLA	18,57	93,18	82,86	64,87
161	MENUKUNG	SUNGAI SAMPAK	12,38	77,34	63,70	51,14
162	MENUKUNG	NUSA PORING	11,91	78,02	73,49	54,47
163	MENUKUNG	BATU ONAP	8,96	74,32	72,24	51,84
164	MENUKUNG	BATU BADAK	4,91	78,94	81,06	54,97
165	MENUKUNG	LIHAI	11,84	94,52	75,14	60,50
166	MENUKUNG	NANGA KERUAB	4,28	79,47	81,08	54,94
167	MENUKUNG	PELAIK KERUAB	13,78	80,26	84,05	59,36
168	MENUKUNG	OYAH	6,23	78,27	87,61	57,37
169	MENUKUNG	BATAS NANGKA	4,84	77,10	93,00	58,31





Hasil Analisa Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Level Desa Tahun 2023

No.	Kecamatan	Desa	Lahan	Sarana	Pddk Krg Sjhtra	Jalan	No Water	Tenkes	KOMP-OSIT
1	SOKAN	TELUK PONGKAL	6	1	5	2	1	1	2
2	TANAH PINOH BARAT	TOGAN BARU	1	3	5	2	1	2	2
3	TANAH PINOH BARAT	GANJANG	1	3	5	2	1	1	2
4	TANAH PINOH BARAT	HARAPAN JAYA	1	2	4	2	1	2	2
5	SOKAN	NANGA ORA	4	2	4	3	3	1	3
6	SOKAN	NANGA LIBAS	6	2	5	3	2	1	3
7	SOKAN	PENYENGGUANG	1	3	4	3	2	1	3
8	SOKAN	NANGA TANGKIT	3	2	4	3	2	2	3
9	TANAH PINOH BARAT	DURIAN JAYA	6	4	6	2	1	2	3
10	TANAH PINOH BARAT	PELITA JAYA	5	2	5	2	4	5	3
11	TANAH PINOH BARAT	ULAK MUID	4	3	5	3	1	6	3
12	TANAH PINOH BARAT	LINTAH TAUM	4	5	4	3	1	4	3
13	TANAH PINOH BARAT	LAJA	4	2	5	3	1	2	3
14	TANAH PINOH BARAT	KELUAS HULU	4	4	5	2	1	2	3
15	BELIMBING	BALAI AGAS	5	3	4	3	3	1	3
16	PINOH SELATAN	BINA JAYA	6	4	4	3	2	2	3
17	PINOH UTARA	MERPAK	4	3	5	3	3	1	3
18	PINOH UTARA	SUNGAI RAYA	1	1	4	3	3	1	3
19	PINOH UTARA	TENGAJAU	1	2	4	3	2	4	3
20	PINOH UTARA	KAYAN SEMAPAU	6	3	4	3	1	1	3
21	ELLA HILIR	KERANGAN KORA	1	2	4	3	4	2	3
22	ELLA HILIR	NANGA KEMPANGAI	1	3	4	3	3	2	3
23	ELLA HILIR	SUNGAI LABUK	1	1	4	3	5	1	3
24	ELLA HILIR	SUNGAI MENTOBA	4	4	5	2	5	1	3
25	ELLA HILIR	NATAI COMPA	3	1	5	2	5	3	3
26	MENUKUNG	LAMAN MUMBUNG	4	2	5	2	3	1	3
27	MENUKUNG	SUNGAI SAMPAK	4	3	4	3	3	1	3
28	MENUKUNG	BATU ONAP	4	1	4	3	2	4	3
29	SOKAN	GELATA	4	5	5	3	3	1	4
30	SOKAN	NANGA BETANGAI	4	5	6	3	3	3	4
31	SOKAN	KELUING TAJA	6	4	4	3	5	1	4
32	SOKAN	NANGA SOKAN	4	3	6	3	4	6	4
33	SOKAN	LANDAU KABU	6	3	4	3	3	4	4
34	SOKAN	MELANA	6	3	6	3	3	5	4
35	SOKAN	TANJUNG MAHUNG	5	3	5	3	5	1	4
36	SOKAN	TELAGA RAYA	6	3	4	3	5	4	4
37	SAYAN	MADYA RAYA	4	4	6	3	3	2	4
38	SAYAN	LANDAU SADAK	5	5	5	3	2	3	4
39	SAYAN	PEKAWAI	3	5	6	4	3	1	4
40	SAYAN	NANGA MANCUR	6	4	6	3	2	2	4
41	SAYAN	TUMBAK RAYA	4	5	6	3	2	4	4
42	SAYAN	NANGA RAKU	5	4	5	3	3	1	4



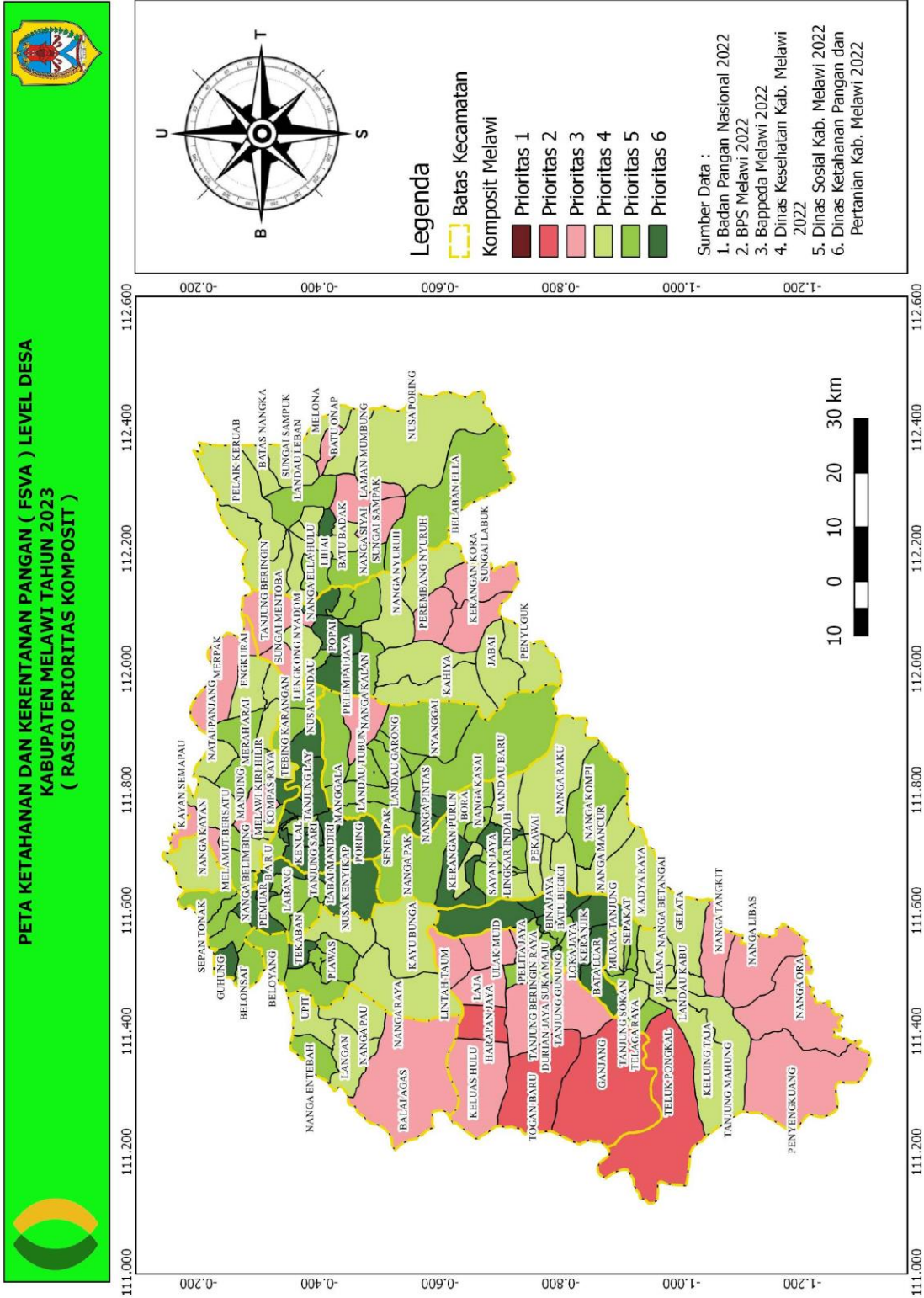
No.	Kecamatan	Desa	Lahan	Sarana	Pddk Krg Sjhtra	Jalan	No Water	Tenkes	KOMP-OSIT
43	SAYAN	META BERSATU	6	2	6	3	4	1	4
44	SAYAN	SILING PERMAI	5	3	6	4	4	1	4
45	SAYAN	BEROBAI PERMAI	6	5	5	3	3	4	4
46	BELIMBING	LANGAN	5	3	4	3	3	3	4
47	BELIMBING	UPIT	4	5	5	3	4	3	4
48	BELIMBING	NANGA PAU	1	4	5	3	3	2	4
49	BELIMBING HULU	NANGA RAYA	6	5	4	3	6	1	4
50	BELIMBING HULU	KAYU BUNGA	4	3	5	3	6	1	4
51	BELIMBING HULU	NANGA TIKAN	4	1	5	4	6	2	4
52	NANGA PINOH	NANGA KAYAN	1	5	6	2	5	3	4
53	PINOH UTARA	SUNGAI PINANG	6	1	5	3	4	3	4
54	PINOH UTARA	ENKURAI	5	1	5	3	4	2	4
55	PINOH UTARA	NANGA MAN	4	1	6	3	4	3	4
56	PINOH UTARA	TANJUNG ARAK	1	3	6	3	5	4	4
57	PINOH UTARA	TEKELAK	4	1	6	3	5	5	4
58	PINOH UTARA	MELAWI KIRI HILIR	4	4	4	3	4	6	4
59	PINOH UTARA	NATAI PANJANG	6	4	4	3	2	3	4
60	PINOH UTARA	SUKA DAMAI	6	2	4	3	2	4	4
61	PINOH UTARA	SENIBUNG	6	3	4	3	1	2	4
62	ELLA HILIR	PENYUGUK	1	1	5	4	5	1	4
63	ELLA HILIR	NANGA NYURUH	1	4	4	3	4	1	4
64	ELLA HILIR	LENGKONG NYADOM	6	4	6	2	5	5	4
65	ELLA HILIR	JABAI	1	4	4	3	5	1	4
66	ELLA HILIR	PEREMBANG NYURUH	1	1	5	3	5	1	4
67	ELLA HILIR	KAHIYA	6	2	4	3	5	1	4
68	ELLA HILIR	BEMBAN PERMAI	5	3	5	3	5	1	4
69	MENUKUNG	MAWANG MENTATAI	3	3	5	3	5	1	4
70	MENUKUNG	MELONA	5	2	4	3	5	5	4
71	MENUKUNG	TANJUNG BERINGIN	3	4	5	3	3	1	4
72	MENUKUNG	SUNGAI SAMPUK	4	1	6	3	4	3	4
73	MENUKUNG	NUSA PORING	4	3	5	3	4	1	4
74	MENUKUNG	BATU BADAK	1	1	5	3	6	1	4
75	MENUKUNG	LIHAI	2	3	5	4	3	4	4
76	MENUKUNG	NANGA KERUAB	3	1	5	3	4	3	4
77	MENUKUNG	PELAIK KERUAB	6	1	6	3	5	2	4
78	MENUKUNG	OYAH	1	1	5	3	5	4	4
79	MENUKUNG	BATAS NANGKA	1	1	4	3	5	4	4
80	SOKAN	SIJAU	4	3	4	3	6	4	5
81	SOKAN	TANJUNG SOKAN	6	1	5	4	3	5	5
82	SOKAN	MUARA TANJUNG	4	6	5	3	5	6	5
83	SOKAN	NANGA POTAI	6	2	4	4	6	5	5
84	SOKAN	SEPAKAT	4	1	6	4	5	6	5
85	TANAH PINOH	LOKA JAYA	6	3	5	3	4	6	5

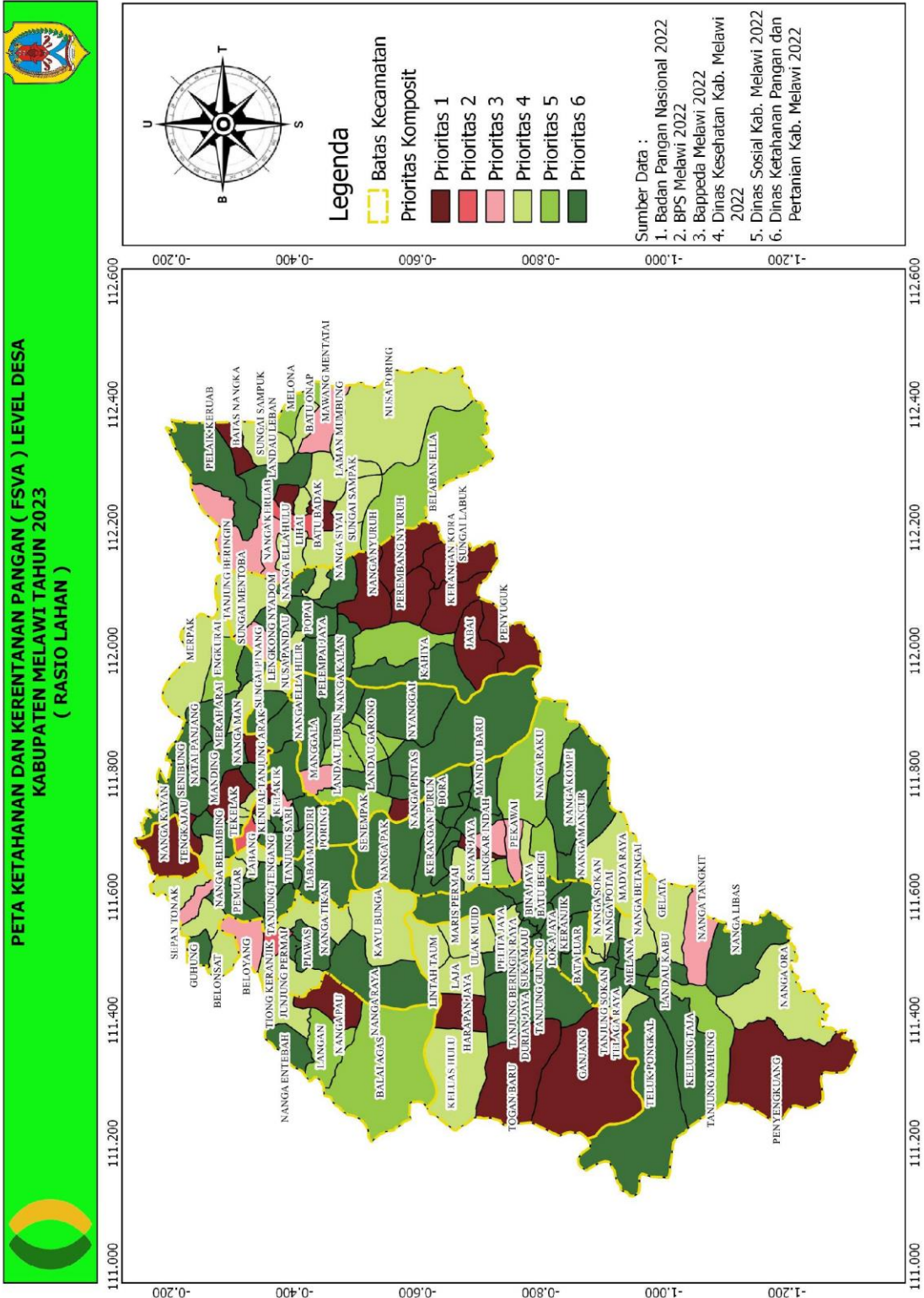


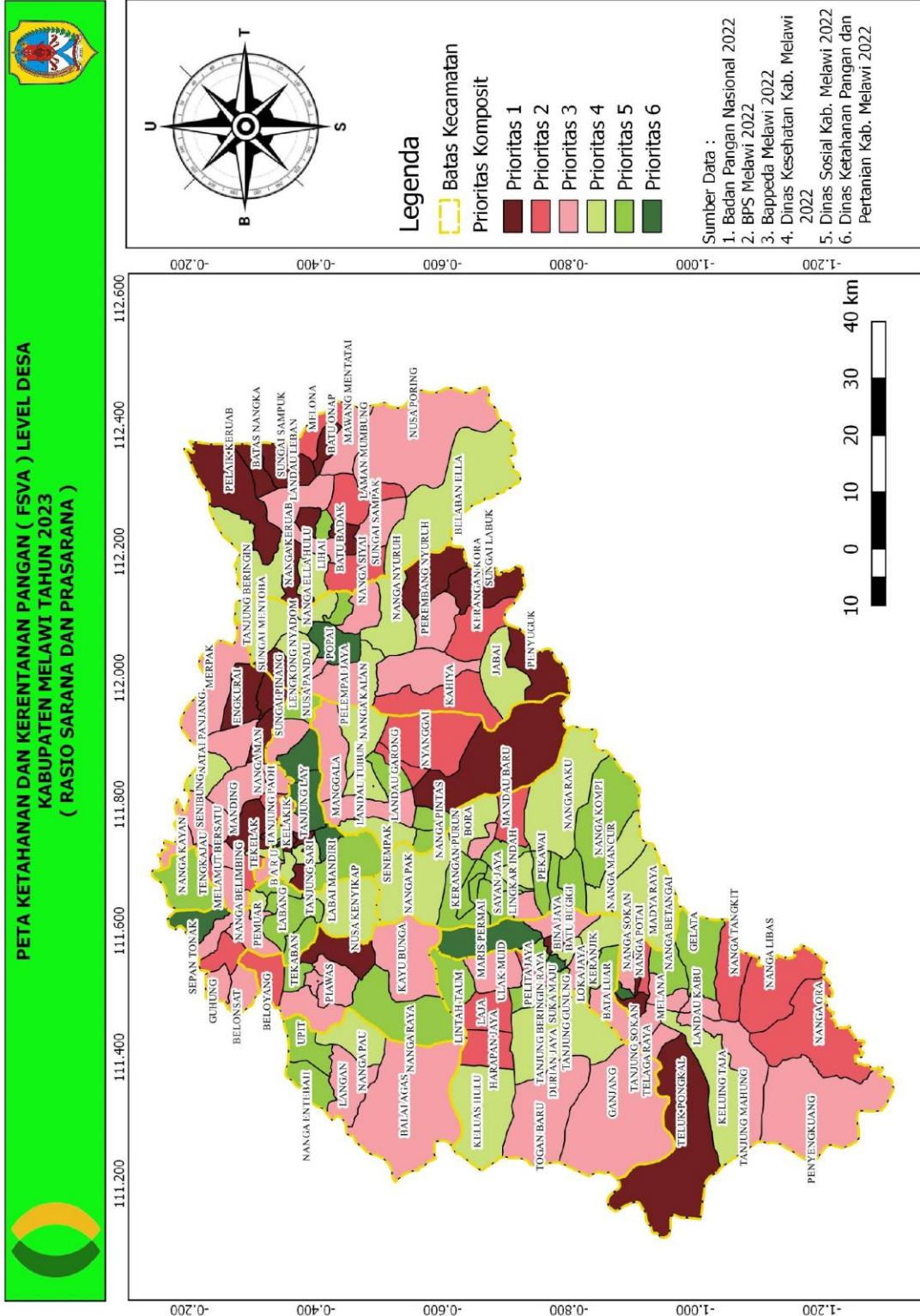
No.	Kecamatan	Desa	Lahan	Sarana	Pddk Krg Sjhtra	Jalan	No Water	Tenkes	KOMP-OSIT
86	TANAH PINOH	BATU BEGIGI	6	4	5	4	5	6	5
87	TANAH PINOH	SUKA MAJU	6	6	5	3	6	6	5
88	TANAH PINOH	TANJUNG BERINGIN RAYA	4	5	4	3	5	5	5
89	TANAH PINOH BARAT	BUKIT RAYA	6	5	6	3	3	5	5
90	SAYAN	NANGA SAYAN	4	5	5	4	4	3	5
91	SAYAN	BORA	6	4	6	4	4	4	5
92	SAYAN	NANGA KOMPI	6	5	6	3	5	2	5
93	SAYAN	NANGA KASAI	6	3	5	4	3	5	5
94	SAYAN	LINGKAR INDAH	3	4	5	4	4	6	5
95	SAYAN	SAYAN JAYA	1	5	6	4	5	5	5
96	SAYAN	NANGA PAK	6	4	6	2	1	2	5
97	BELIMBING	BATU AMPAR	6	5	5	4	4	2	5
98	BELIMBING	BELONSAT	4	3	6	4	5	3	5
99	BELIMBING	BATU NANTA	4	2	6	4	6	4	5
100	BELIMBING	LAMAN BUKIT	3	3	6	4	6	4	5
101	BELIMBING	NANGA ENTEBAH	6	5	5	3	3	3	5
102	BELIMBING	TEKABAN	6	5	5	4	3	6	5
103	BELIMBING	NANGA MENUNUK	5	5	6	4	3	5	5
104	BELIMBING	SEPAN TONAK	4	6	6	3	4	3	5
105	BELIMBING HULU	NANGA KEBERAK	6	3	5	3	6	5	5
106	BELIMBING HULU	PIAWAS	6	3	5	4	5	4	5
107	BELIMBING HULU	JUNJUNG PERMAI	4	3	4	3	6	4	5
108	BELIMBING HULU	BELOYANG	3	2	6	4	6	3	5
109	NANGA PINOH	B A R U	2	3	6	4	6	4	5
110	NANGA PINOH	NUSA PANDAU	4	5	5	4	5	5	5
111	NANGA PINOH	TEBING KARANGAN	6	3	5	3	6	3	5
112	NANGA PINOH	TANJUNG LAY	3	1	6	4	6	5	5
113	NANGA PINOH	KENUAL	4	1	6	4	6	5	5
114	PINOH SELATAN	MANDAU BARU	6	1	5	4	5	1	5
115	PINOH SELATAN	SENEMPAK	5	4	6	3	6	5	5
116	PINOH SELATAN	LANDAU GARONG	5	5	5	4	5	3	5
117	PINOH SELATAN	SUNGAI BAKAH	5	2	5	4	6	1	5
118	PINOH SELATAN	NYANGGAI	6	2	5	4	6	2	5
119	PINOH SELATAN	BAYUR RAYA	6	3	5	4	3	3	5
120	PINOH SELATAN	PELINGGANG	6	3	5	3	3	1	5
121	PINOH SELATAN	MANGGALA	3	3	6	4	5	6	5
122	PINOH SELATAN	LANDAU TUBUN	5	4	5	4	6	4	5
123	PINOH UTARA	MERAH ARAI	6	3	4	3	1	1	5
124	PINOH UTARA	KOMPAS RAYA	4	1	6	4	5	6	5
125	PINOH UTARA	MANDING	6	3	4	3	5	2	5
126	PINOH UTARA	NANGA BELIMBING	4	3	5	4	3	3	5
127	PINOH UTARA	MELAMUT BERSATU	6	3	5	3	2	1	5



No.	Kecamatan	Desa	Lahan	Sarana	Pddk Krg Sjhtra	Jalan	No Water	Tenkes	KOMP-OSIT
128	ELLA HILIR	NANGA KALAN	6	4	5	3	3	3	5
129	ELLA HILIR	NANGA ELLA HILIR	4	3	5	4	6	5	5
130	ELLA HILIR	DOMET PERMAI	4	5	6	3	5	5	5
131	ELLA HILIR	NYANGGAU	6	3	5	4	5	3	5
132	MENUKUNG	NANGA SIYAI	4	2	5	4	5	2	5
133	MENUKUNG	NANGA ELLA HULU	4	4	5	4	3	4	5
134	MENUKUNG	LANDAU LEBAN	6	3	5	3	5	3	5
135	MENUKUNG	BELABAN ELLA	5	4	4	4	6	1	5
136	TANAH PINOH	MADONG RAYA	6	5	5	4	6	3	6
137	TANAH PINOH	BINA KARYA	6	1	5	4	4	5	6
138	TANAH PINOH	BINA JAYA	6	3	5	4	5	4	6
139	TANAH PINOH	BATA LUAR	6	3	4	4	4	4	6
140	TANAH PINOH	KERANJIK	6	5	6	3	6	5	6
141	TANAH PINOH	PELITA KENAYA	6	4	5	3	5	3	6
142	TANAH PINOH	MARIS PERMAI	6	6	5	3	4	3	6
143	TANAH PINOH	TANJUNG GUNUNG	6	5	4	1	5	6	6
144	SAYAN	MEKAR PELITA	6	5	6	4	5	5	6
145	SAYAN	KERANGAN PURUN	6	5	5	3	3	3	6
146	BELIMBING	NUSA KENYIKAP	6	4	6	4	6	3	6
147	BELIMBING	PEMUAR	4	4	6	4	6	6	6
148	BELIMBING	BATU BUIL	6	3	6	4	5	6	6
149	BELIMBING	GUHUNG	6	3	6	4	6	4	6
150	BELIMBING	LABANG	4	5	6	4	5	5	6
151	BELIMBING HULU	TIONG KERANJIK	2	5	5	4	6	6	6
152	NANGA PINOH	NANGA KEBEBU	6	6	6	4	6	3	6
153	NANGA PINOH	PORING	6	5	6	4	6	1	6
154	NANGA PINOH	TANJUNG SARI	6	1	6	4	6	5	6
155	NANGA PINOH	TEMBAWANG PANJANG	6	4	6	4	6	5	6
156	NANGA PINOH	PAAL	1	5	6	4	6	6	6
157	NANGA PINOH	TANJUNG NIAGA	1	5	6	4	6	6	6
158	NANGA PINOH	SIDO MULYO	4	5	6	4	6	6	6
159	NANGA PINOH	KELAKIK	1	3	6	4	6	6	6
160	NANGA PINOH	SEMADIN LENGKONG	6	6	6	4	6	4	6
161	NANGA PINOH	LABAI MANDIRI	6	6	6	3	5	4	6
162	NANGA PINOH	TANJUNG TENGANG	6	4	6	4	6	5	6
163	PINOH SELATAN	NANGA PINTAS	6	5	5	4	5	4	6
164	PINOH SELATAN	NANGA KELAWAI	1	5	5	4	6	6	6
165	PINOH UTARA	TANJUNG PAOH	6	2	6	3	5	4	6
166	ELLA HILIR	NANGA NUAK	6	4	5	4	5	4	6
167	ELLA HILIR	PELEMPAI JAYA	6	3	5	4	6	6	6
168	ELLA HILIR	POPAI	6	6	6	4	5	3	6
169	MENUKUNG	MENUKUNG KOTA	4	5	5	4	6	6	6

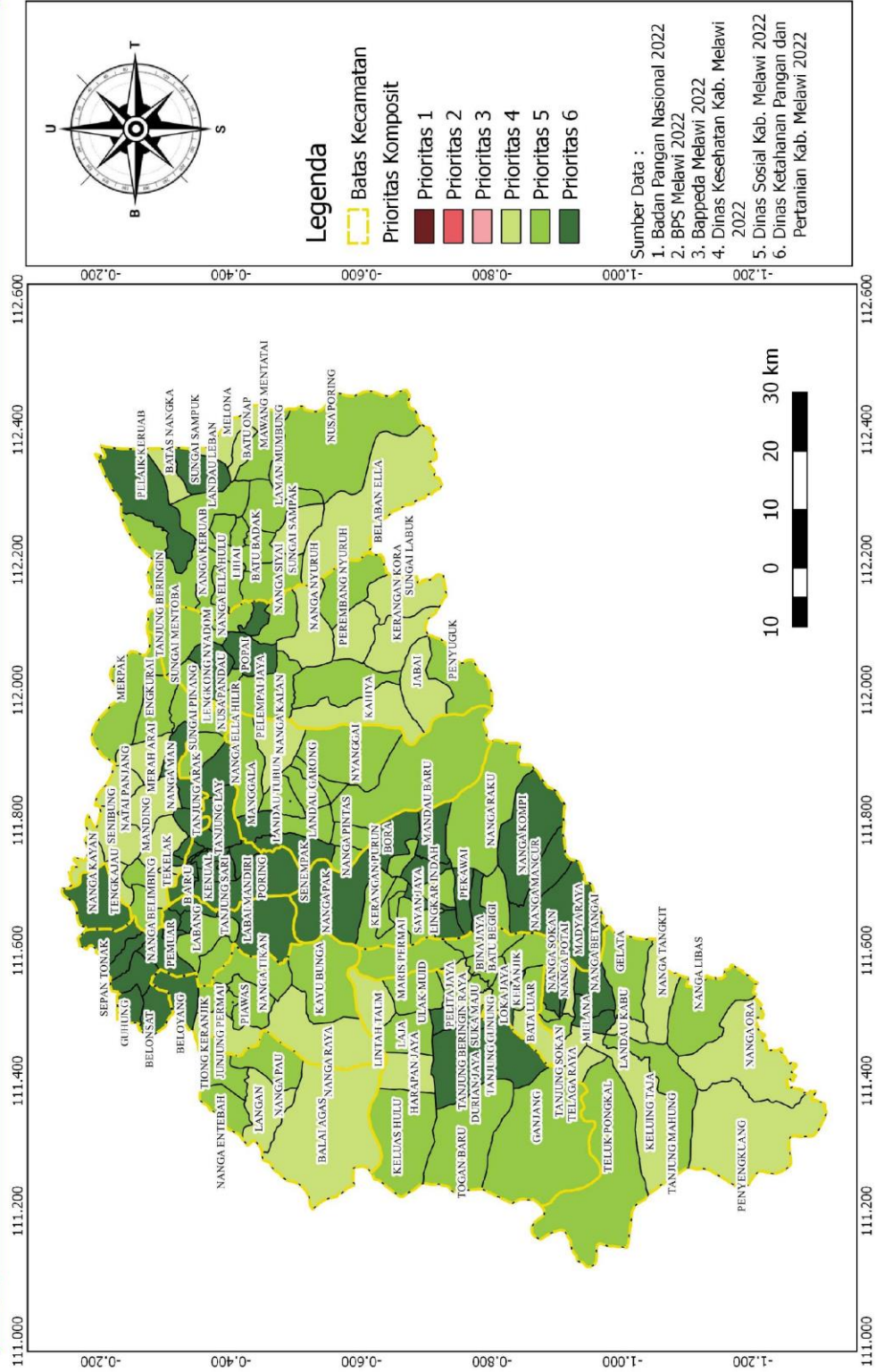








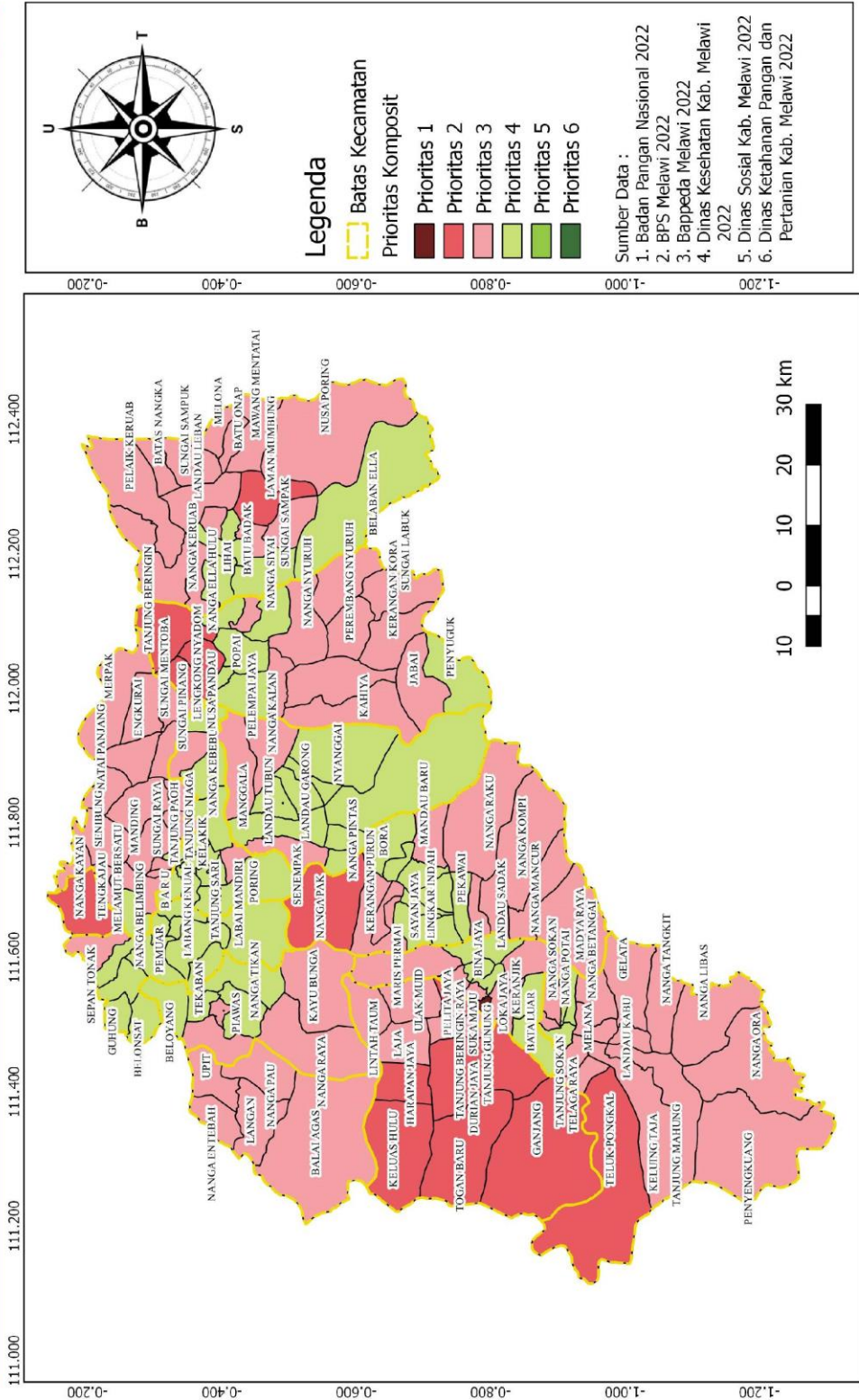
**PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN ( FSVA ) LEVEL DESA  
KABUPATEN MELAWI TAHUN 2023  
( RASIO JUMLAH PENDUDUK DENGAN TINGKAT KESEJAHTERAAN TERENDAH)**



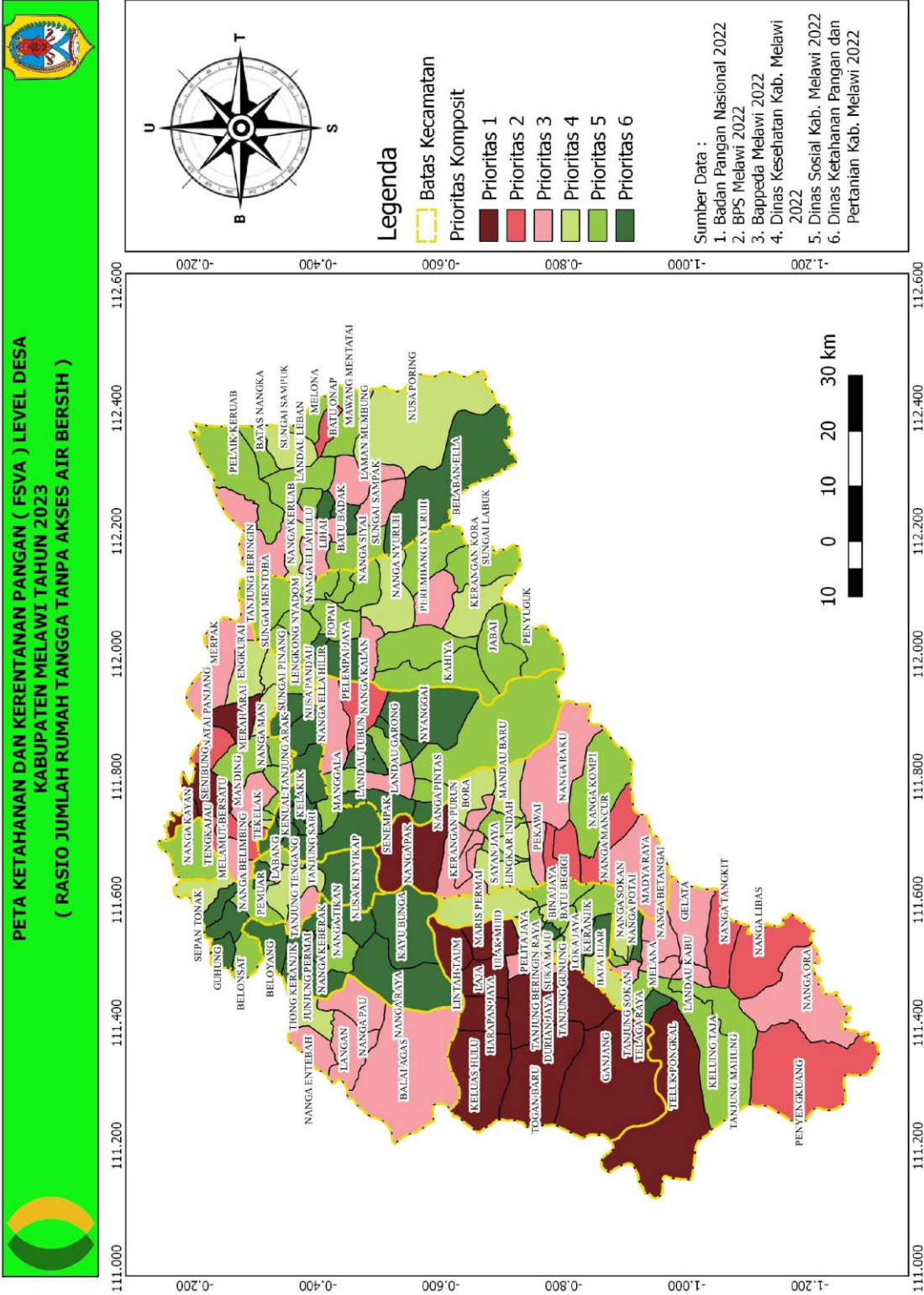




**PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN ( FSVA ) LEVEL DESA  
KABUPATEN MELAWI TAHUN 2023  
( RASIO AKSES PENGHUBUNG )**

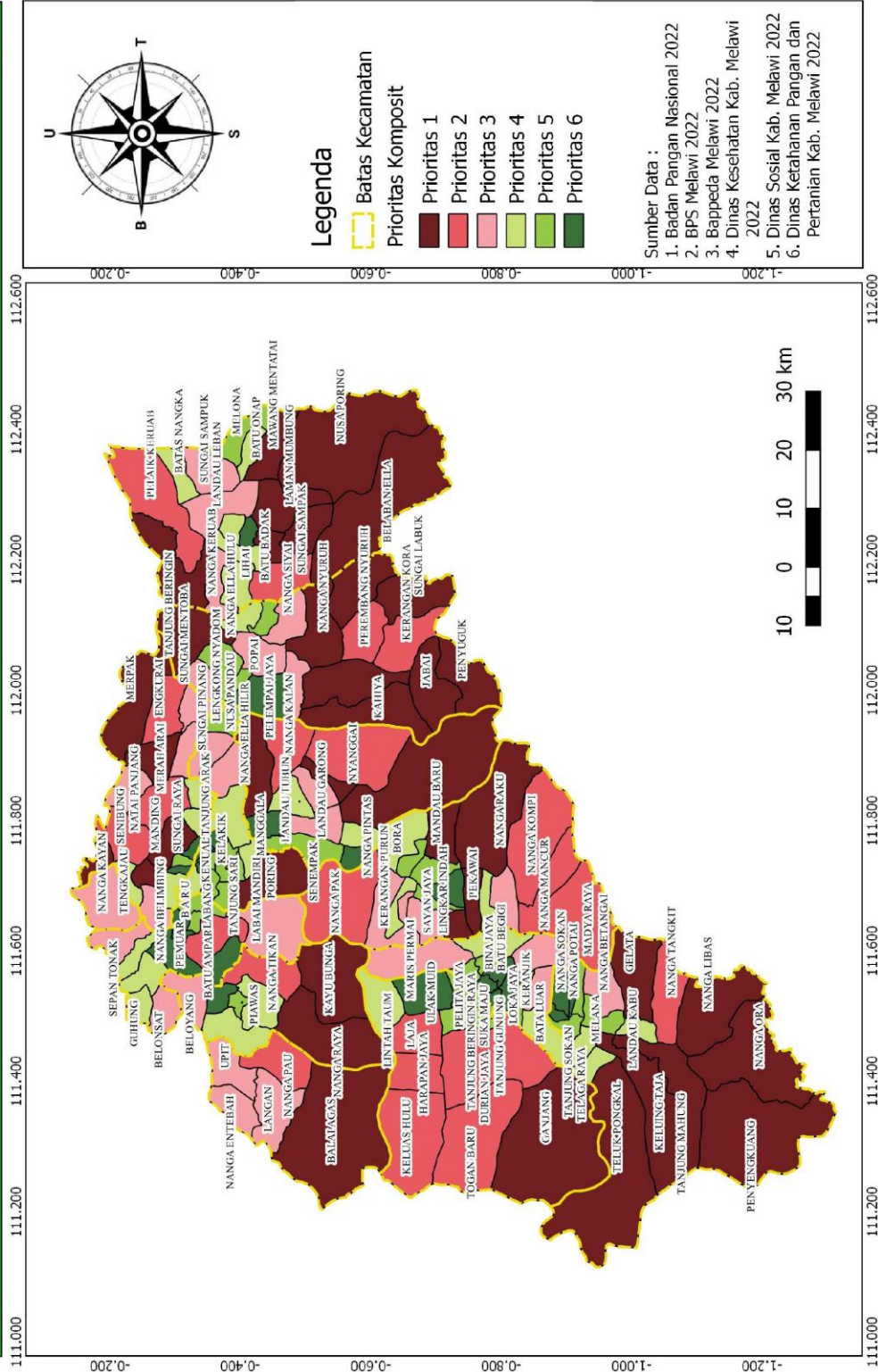


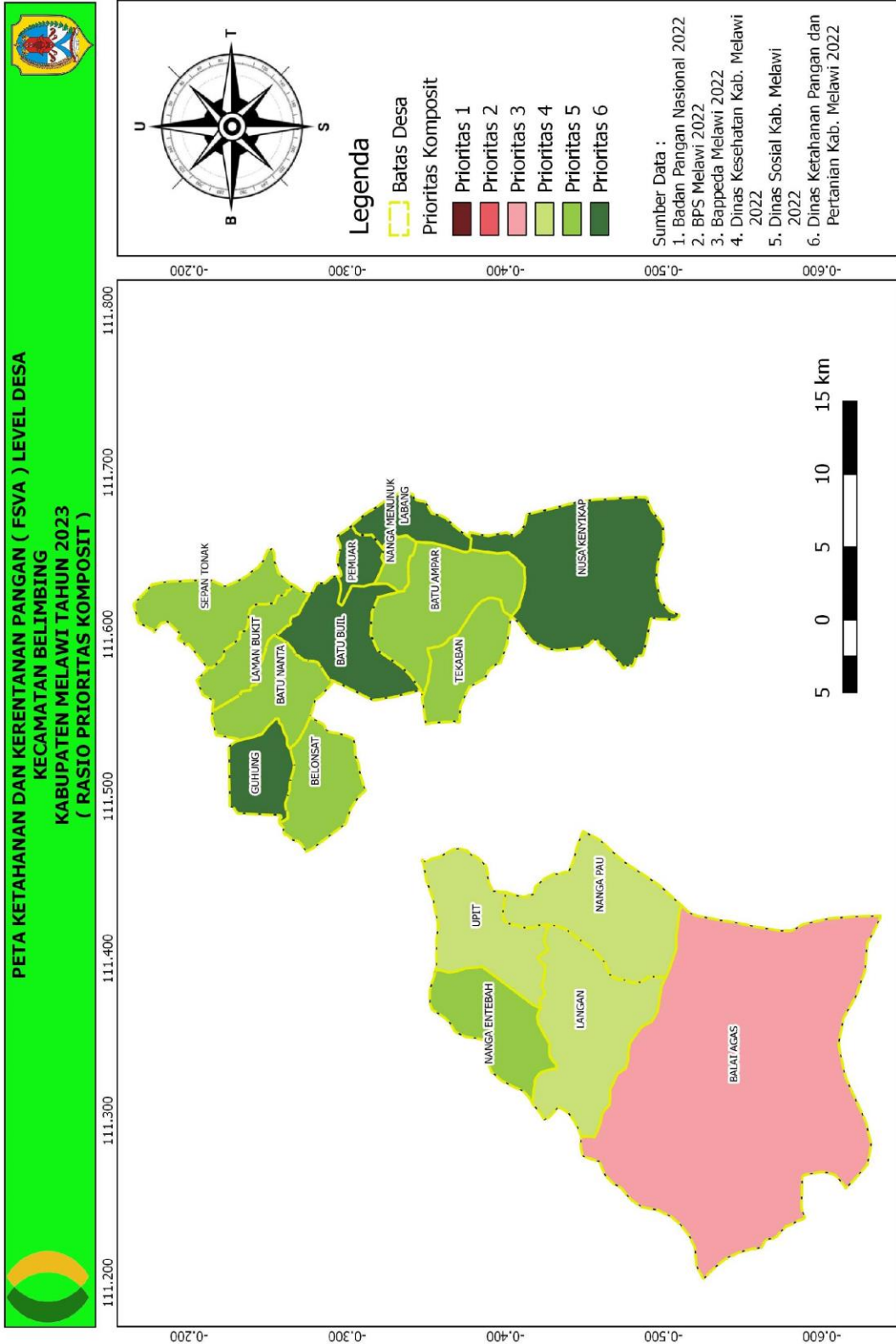
Sumber Data :  
 1. Badan Pangan Nasional 2022  
 2. BPS Melawi 2022  
 3. Bappeda Melawi 2022  
 4. Dinas Kesehatan Kab. Melawi 2022  
 5. Dinas Sosial Kab. Melawi 2022  
 6. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Melawi 2022

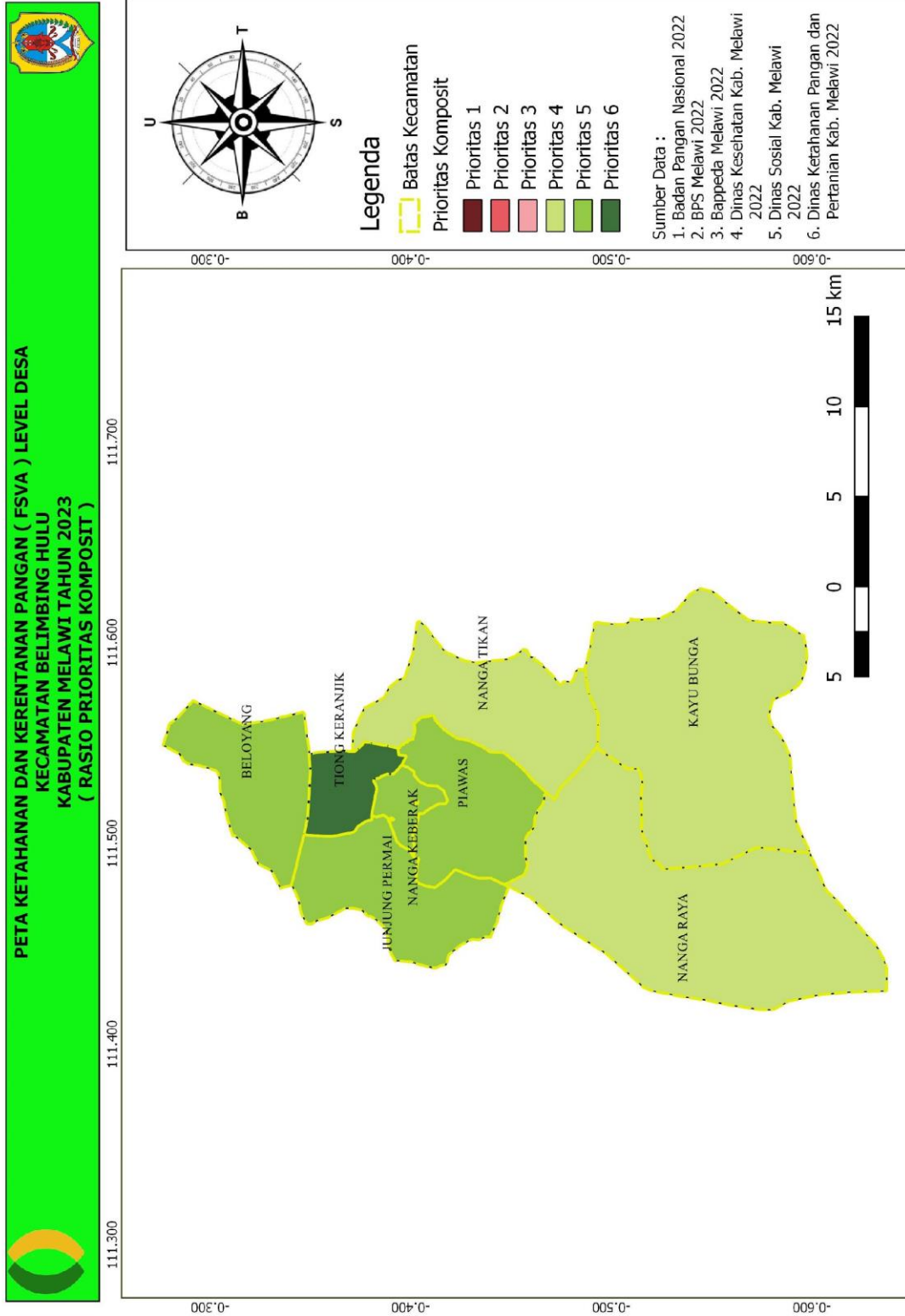




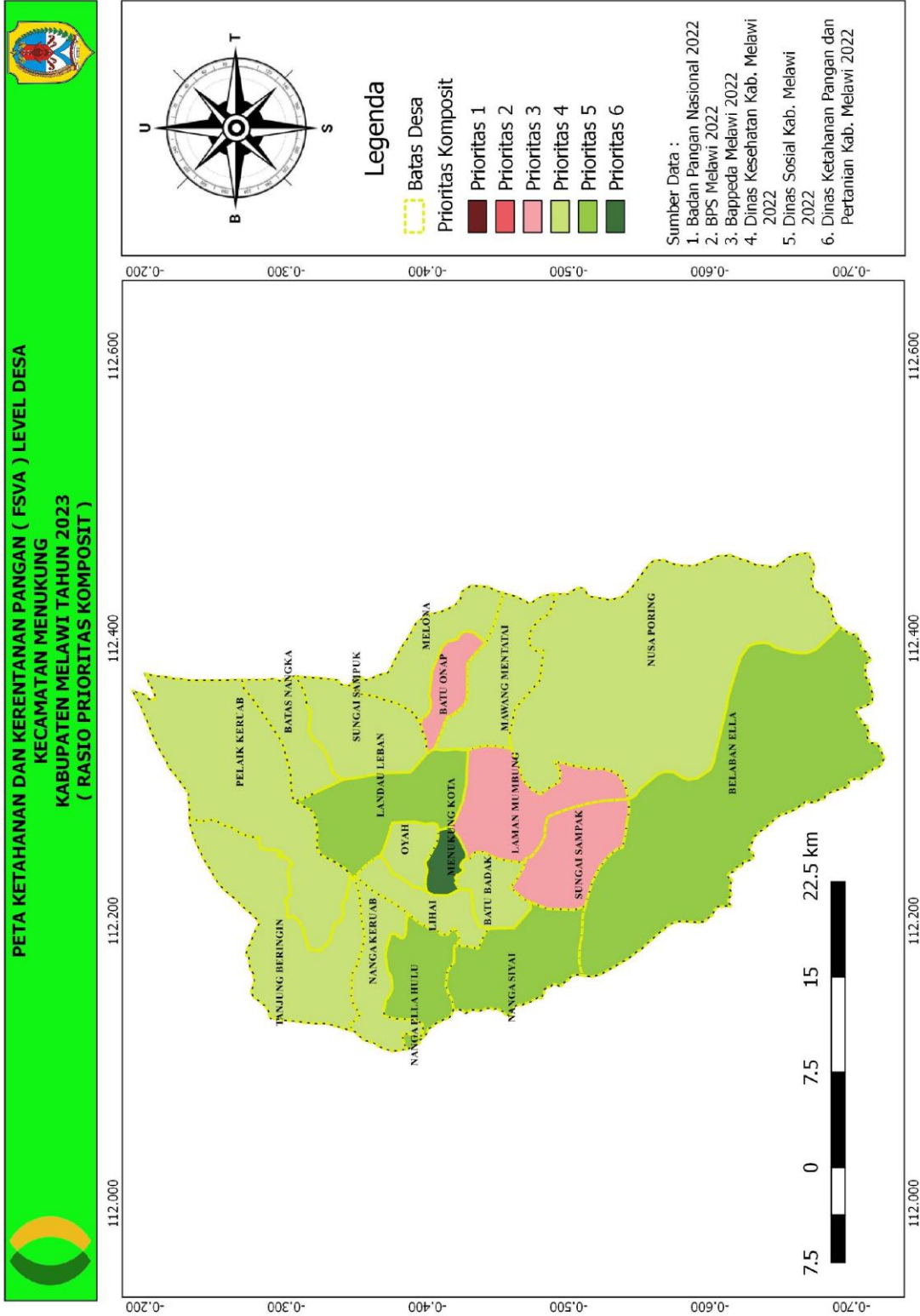
**PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN ( FSVA ) LEVEL DESA  
KABUPATEN MELAWI TAHUN 2023  
( RASIO JUMLAH PENDUDUK DESA PER TENAGA KESEHATAN )**

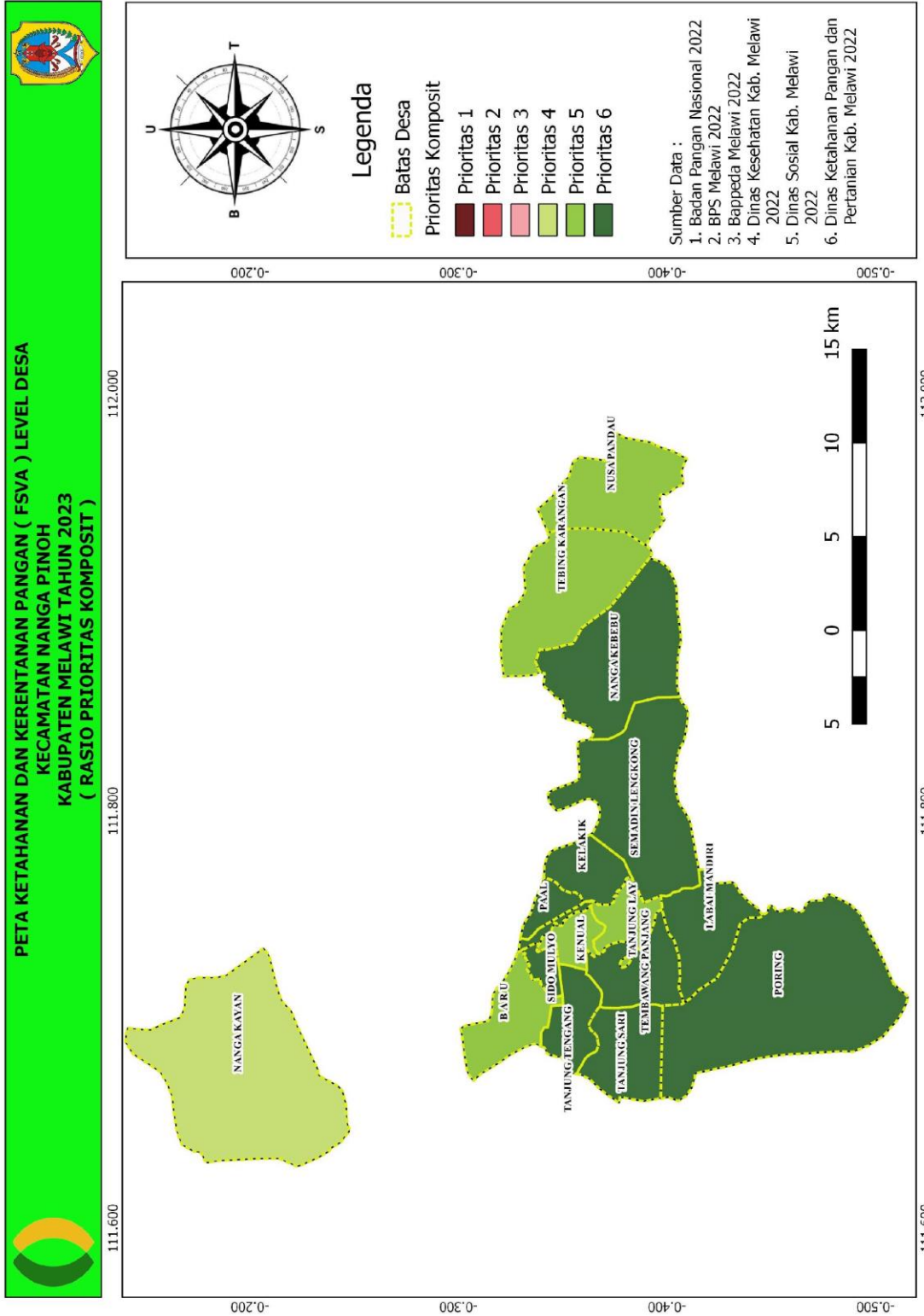




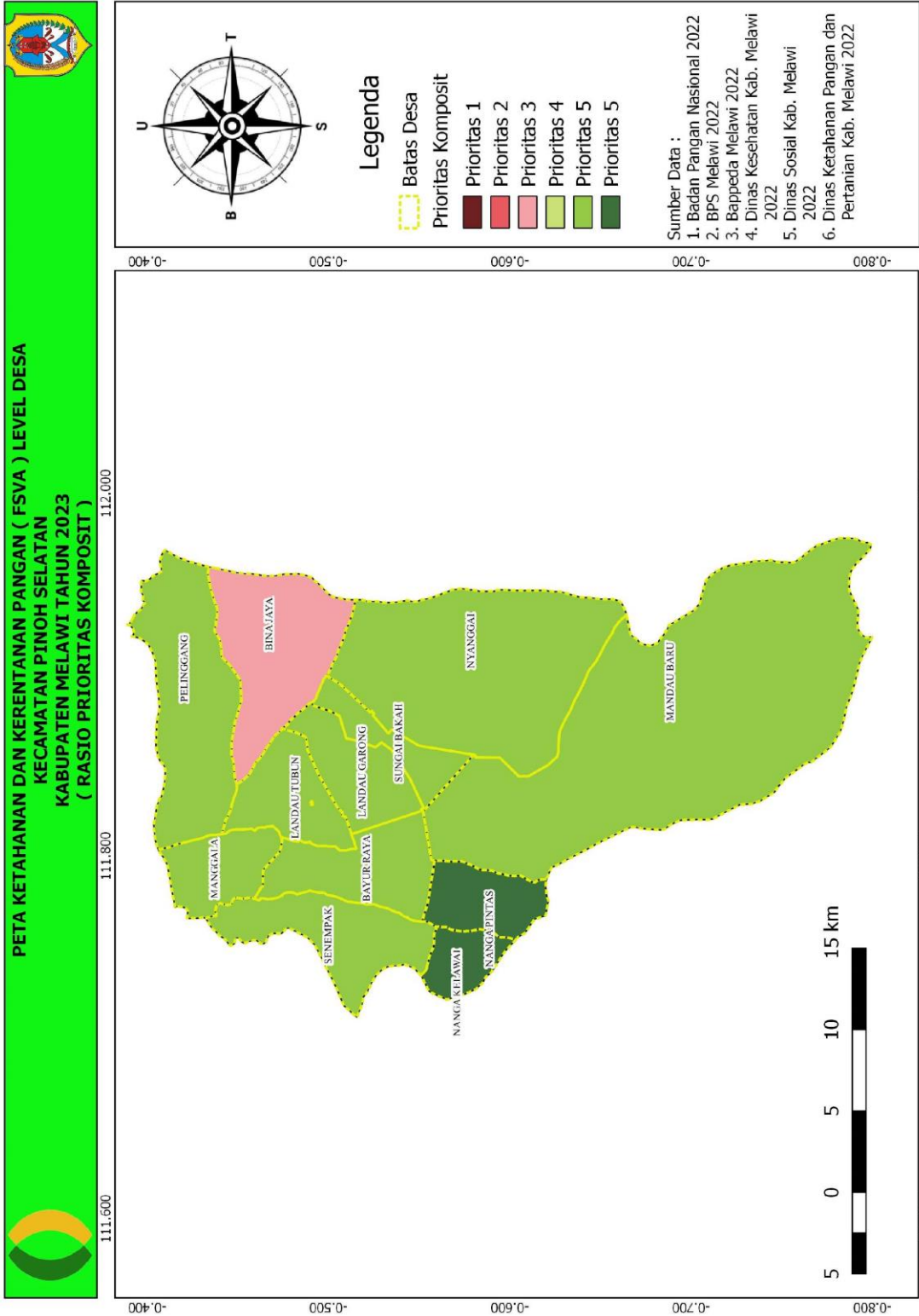


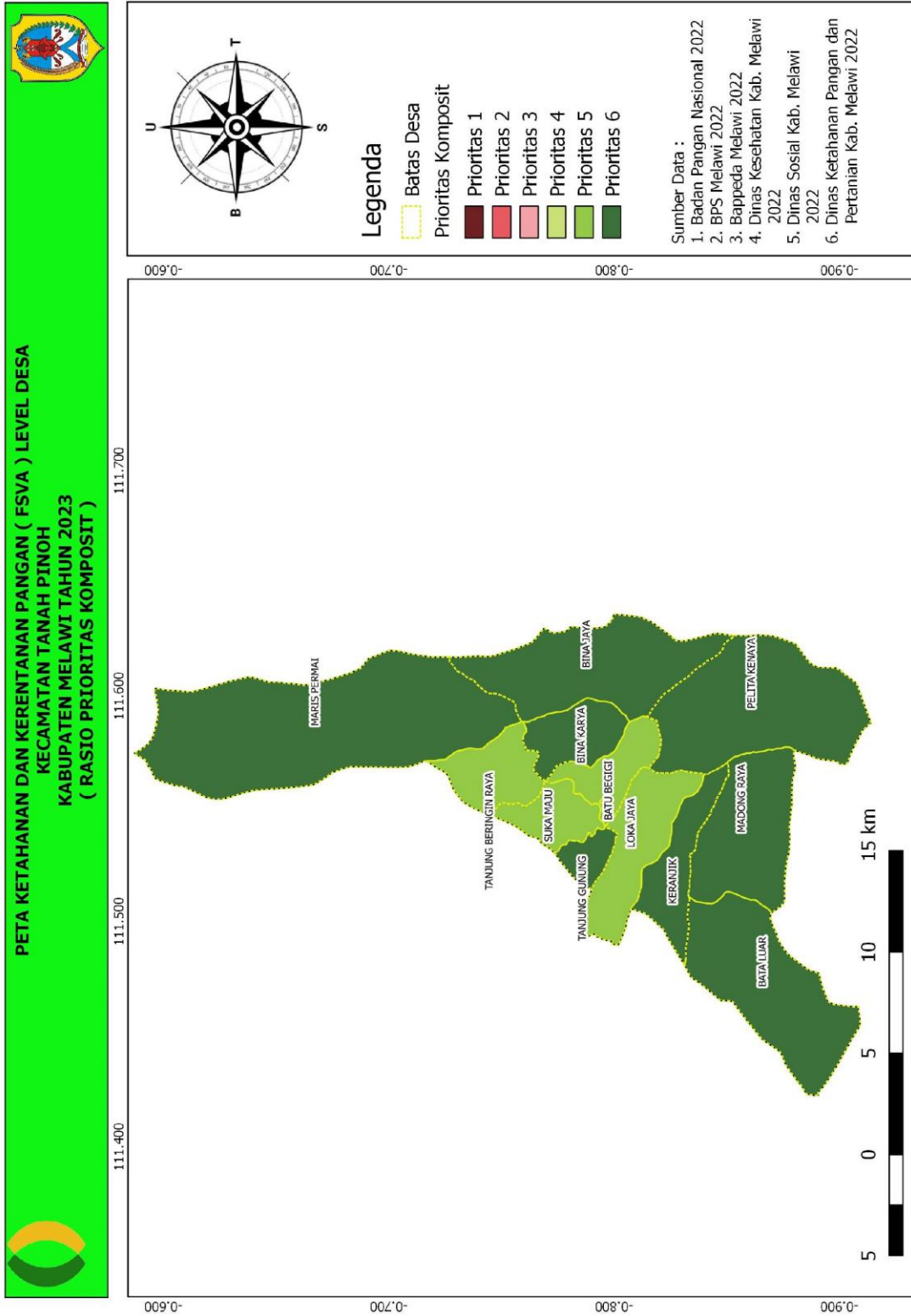


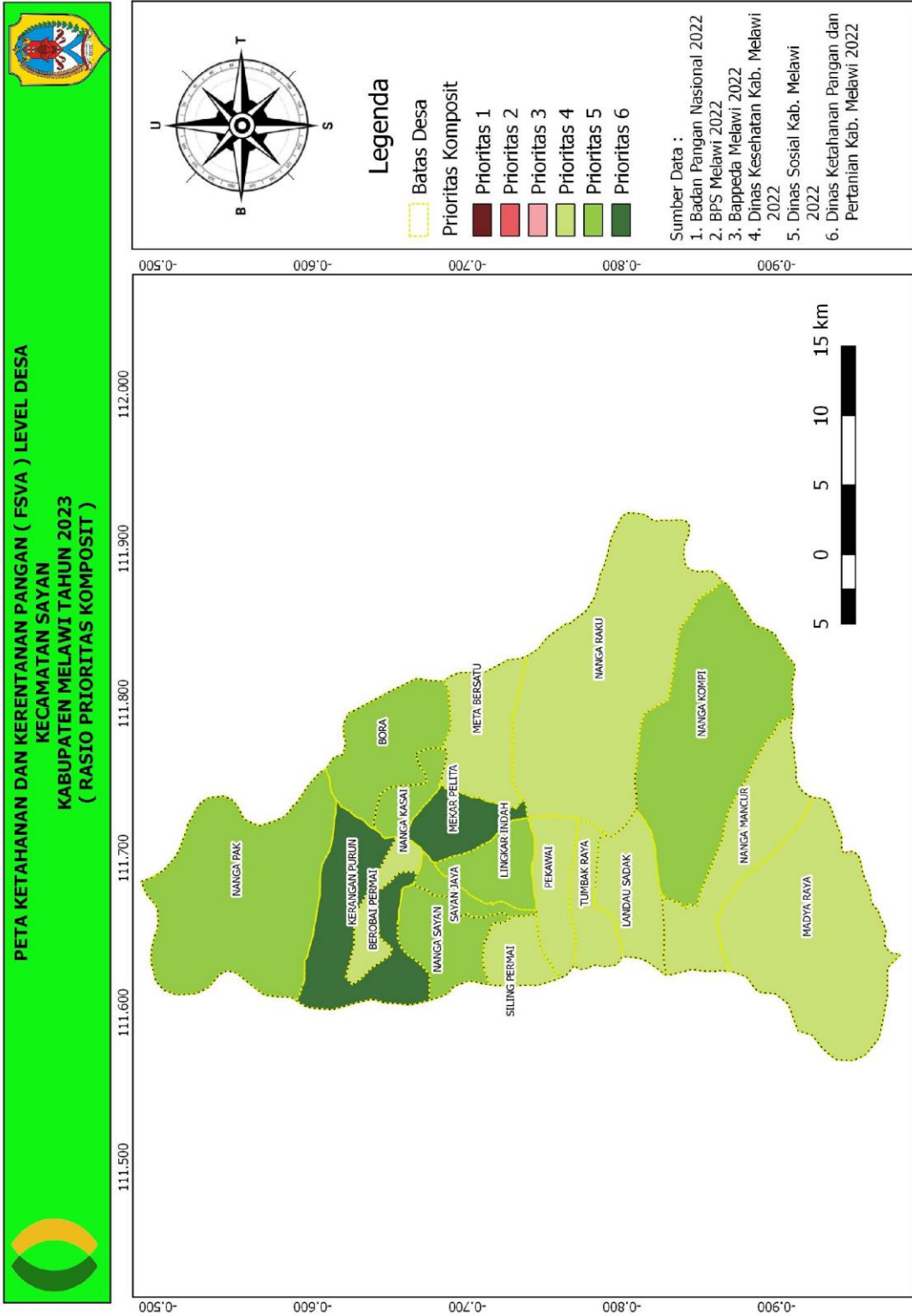
















**PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN ( FSVA ) LEVEL DESA  
KECAMATAN TANAH PINOH BARAT  
KABUPATEN MELAWI TAHUN 2023  
( RASIO PRIORITAS KOMPOSIT )**

